



**ANALISIS DAYA SAING SEKTOR EKONOMI DAN  
KEBIJAKANNYA DI KABUPATEN CILACAP**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :  
**Dini Rahmawati**  
**NIM 130810101088**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2017**

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan puji syukur yang tak terhingga pada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Haryani dan Ayahanda Tasirun yang tiada henti memberi dukungan, doa dan pengorbanan selama ini;
2. Guru-guru dari sejak Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

**MOTTO**

“Salah satu hal terbaik dalam hidup adalah melihat senyum di wajah orangtuamu,  
dan menyadari bahwa kamulah alasannya.”

(Prestigeholics)

“Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat  
mereka berbahagia di dunia ini, yaitu; seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk  
dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan.”

(Tom Bodett)

“Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah berbuat baik  
terhadap diri sendiri.”

(Benyamin Franklin)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dini Rahmawati

NIM : 130810101088

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul : “Ekonomi Regional: Analisis Daya Saing Sektor Ekonomi dan Kebijakannya Di Kabupaten Cilacap” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada intuisi mana pun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 September 2017

Yang menyatakan,

Dini Rahmawati

(NIM. 130810101088)

**SKRIPSI**

**EKONOMI REGIONAL: ANALISIS DAYA SAING SEKTOR  
EKONOMI DAN KEBIJAKANNYA DI KABUPATEN  
CILACAP**

Oleh :

**Dini Rahmawati**

**130810101088**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Moh. Adenan, M.M.

**TANDA PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Ekonomi Regional: Analisis Daya Saing Sektor Ekonomi  
Dan Kebijakanannya Di Kabupaten Cilacap

Nama Mahasiswa : Dini Rahmawati

NIM : 130810101088

Jurusan : Studi Ekonomi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Regional

Tanggal Persetujuan : 06 September 2017

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P.  
NIP. 19720713 199903 1 001

Dr. Moh. Adenan, M.M.  
NIP. 19661031 199203 1 001

Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindartin, S.E., M.Kes.  
NIP. 19641108 198902 2 001

**PENGESAHAN**

**Judul Skripsi**

**EKONOMI REGIONAL: ANALISIS DAYA SAING SEKTOR EKONOMI  
DAN KEBIJAKANNYA DI KABUPATEN CILACAP**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Dini Rahmawati

NIM : 130810101088

Jurusan : Ilmu Ekonomi

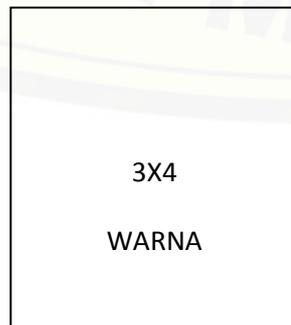
Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

13 Oktober 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Riniati, M.P. .....  
19600430 198603 2 001
2. Sekretaris : Dra. Nanik Istiyani, M.Si. .....  
19610122 198702 2 002
3. Anggota : Dr. Regina Niken W., S.E, M.Si. .....  
19740913 200112 2 001



Mengetahui/Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Dekan,

Dr. M. Miqdad, S.E., M.M., Ak., C.A.  
NIP. 19710727 199512 1 001

*Analisis Daya Saing Sektor Ekonomi Dan Kebijakannya Di Kabupaten Cilacap*

**Dini Rahmawati**

*Program Studi Ekonomi Pembangunan, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember*

## **ABSTRAK**

Pembangunan ekonomi suatu daerah sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan perekonomian suatu daerah, dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor ekonomi yang dapat mendorong dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cilacap dan untuk menganalisis strategi pertumbuhan ekonomi dalam memperkuat daya saing ekonomi Kabupaten Cilacap. Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner dan data sekunder berupa PDRB Provinsi Jawa Tengah dan PDRB Kabupaten Cilacap tahun 2011-2015, dengan alat analisis yang digunakan adalah *Shift-Share (SS)* dan *Analitycal Hierarchy Process (AHP)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan alat analisis *Shift-Share (SS)* sektor yang memiliki keunggulan kompetitif (daya saing) pada Kabupaten Cilacap adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor industri pengolahan; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor real estate; sektor administraasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa lainnya. Dari hasil alat analisis *Analitycal Hierarchy Process (AHP)* yang dijadikan sebagai strategi perencanaan pembangunan untuk Kabupaten Cilacap dalam mengelola daya saing daerah adalah dengan Kebijakan pengembangan kualitas SDM, yang didukung melalui peningkatan kualitas aparat serta pendidikan dan pelatihan.

**Kata kunci:** Produk Domestik Regional Bruto, Keunggulan kompetitif, Strategi Perencanaan Pembangunan.

*Analysis on Economic Sector Competitiveness and Its Policy In Cilacap Regency*

**Dini Rahmawati**

*Economic Development Study Program, Department of Economics, Faculty of  
Economics and Business, University of Jember*

**ABSTRACT**

*The economic development of a region is indispensable in order to improve the economy of a region, with the efforts of the utilization and management of resources owned by the area. This research aims to find out which sectors of the economy that can be pushed in improving economic growth in the region of counties Cilacap and Cilacap economy of the region in strengthening the competitiveness of the economy of Kabupaten Cilacap. The research of using primary data in the form of questionnaires and secondary data in the form of GDRP of Central Java and Cilacap Regency GDRP year 2011-2015, with analytical tools used are Shift-Share (SS) and Analytical Hierarchy Process (AHP). The results of this research show that with the analysis tool Shift-Share (SS) sector has a competitive advantage (competitiveness) at Cilacap Regency is a sector of agriculture, forestry and fisheries; sectors of the processing industry; large and retail trade sectors, car and motorbike repair; the transportation and warehousing sector; sector provision of accommodation and sustenance; financial services and insurance sector; the real estate sector; administrative government sector, defense and compulsory social security; the service sector health and social activities; other services. From the results of the analysis tools Analytical Hierarchy Process (AHP) used as a strategy of development planning for the County of Cilacap in managing regional competitiveness is the quality of human resources development policy, which is supported through improved quality of apparatus as well as education and training.*

**Keywords:** *Gross Regional Domestic Product, Competitive Advantages, Strategy Development Planning.*

## RINGKASAN

**Analisis Ekonomi Daya Saing Sektor Ekonomi dan Kebijakannya di Kabupaten Cilacap:** Dini Rahmawati, 130810101088; 2017; 142 halaman; Program Studi Ekonomi Pembangunan, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.

Perekonomian daerah saat ini memang sedang menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, karena perekonomian daerah merupakan salah satu cara yang akan mengantarkan Indonesia dalam meningkatkan perekonomian negara. Untuk meningkatkan perekonomian suatu daerah maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang strategis. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah.

Pembangunan ekonomi daerah juga melibatkan kebijakan-kebijakan pembangunan untuk membantu suatu daerah dalam mengelola daerah seperti penggunaan potensi baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, dan kelembagaan. Kebijakan pembangunan daerah tidak terlepas dari otonomi daerah yang berperan untuk mewujudkan keserasian antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar mencapai keselarasan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan daerah. Permasalahan otonomi daerah dapat diminimalkan dengan perencanaan pembangunan ekonomi daerah, yang dapat membaca dan merencanakan suatu daerah ke depannya dengan tetap memperhatikan potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah.

Pembangunan ekonomi daerah tidak dapat terlepas dari daya saing, yang dimana suatu masyarakat dan daerah akan bertahan apabila memiliki daya saing yang tinggi, dengan melalui potensi yang dimiliki oleh daerah. Dengan demikian dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah, perlu dikembangkan sentra-sentra ekonomi daerah yang di desain dengan menggunakan standar internasional. Pemerintah harus melihat sektor mana sajakah yang memiliki

keunggulan untuk dapat dikembangkan, yang diharapkan mampu mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang.

Kabupaten Cilacap merupakan Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah yang cukup besar dan memiliki sumberdaya alam yang melimpah pada tiga kawasan yaitu, kawasan pesisir, kawasan dataran rendah, dan kawasan dataran tinggi. Sumberdaya yang dimiliki oleh Kabupaten Cilacap masing-masing memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, namun belum mampu dikelola dengan baik oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja sektor-sektor di wilayah Kabupaten Cilacap dan untuk menganalisis strategi perekonomian wilayah dalam memperkuat daya saing ekonomi Kabupaten Cilacap. Penelitian ini menggunakan dua metode dalam pemecahan permasalahan untuk mencapai tujuan, yaitu analisis *Shift-Share* (SS) dan analisis *Analitycal Hierarchy Process* (AHP), sedangkan data yang digunakan adalah 17 sektor ekonomi pada PDRB Provinsi Jawa Tengah dan PDRB Kabupaten Cilacap tahun 2010-2015 dengan Atas Dasar Harga Konstan. Hasil studi menunjukkan Kabupaten Cilacap memiliki 11 sektor ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif (daya saing) yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor industri pengolahan; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor real estate; sektor jasa perusahaan; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; sektor jasa lainnya. Hasil yang kedua yaitu dalam menentukan strategi perencanaan pembangunan daerah didapat strategi kebijakan pengembangan kualitas SDM yang didukung dengan peningkatan kualitas aparat serta pendidikan dan pelatihan.

## PRAKATA

Segala puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Daya Saing Sektor Ekonomi Dan Kebijakannya Di Kabupaten Cilacap”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Herman Cahyo Diartho, S.E., M.P dan Bapak Dr. Moh. Adenan, M.M selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan yang bermanfaat pada penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Dr. M. Miqdad, S.E., M.M., AK., CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Ibu Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan selaku Dosen Pembimbing Akademik;
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, khususnya Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis sampai akhir penyelesaian skripsi ini;
5. Ayahanda Tasirun dan Ibunda Haryani atas segala pengorbanan, doa, dukungan dan ketulusan yang diberikan kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini;

6. Kakak Aris Hartanto dan Adik-adik Nur Anisah, Dita Kholifah, Aditya Nur Ikhsan, atas segala dukungan, doa, semangat dan menjadi motivasi dalam setiap perjalanan hidup penulis;
7. Sahabat-sahabat Agam Nur, Adinda Mahardika, Ardian Cahyo, Bagus Alvin, Wildan Aziz, Zulfikar Adarda', Adelia Apriliyanti, Putri Ersya, Fitri Khoirunnisa, Eka Wahyu, Sayyari Ahadiyaz, yang sampai saat ini masih disamping penulis dalam memberikan dukungan, semangat, doa dan selalu menghiasi hari dengan senyuman;
8. Orang-orang istimewa Satria Wiratama, Putri Wigrha, Martha Rahmanto, Faizal Arfian, Zaka Kurnia, Zainuri, Disky Fajar, Risqy Ishaki, dan Imam Mahmudi yang selalu meluangkan waktu untuk membantu penulis dan memberikan dukungannya;
9. Segenap keluarga besar Jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2013 atas segala kesempatan terbaik yang penuh makna;
10. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah Anda berikan. Penulis juga menerima saran dan kritik demi penyempurnaan skripsi ini dan semoga dapat memberikan manfaat pada kita semua.

Jember, 13 September 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PEMBIMBING .....	v
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
RINGKASAN .....	x
PRAKATA .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
<b>2.1 Landasan Teori.....</b>	<b>11</b>
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah .....	11
2.1.2 Teori Daya Saing .....	14
2.1.3 Teori Pembangunan Ekonomi Daerah .....	19
2.1.4 Teori Kebijakan Publik.....	20
2.1.5 Teori Perencanaan Wilayah .....	22
<b>2.2 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>24</b>
<b>2.3 Kerangka Konseptual .....</b>	<b>29</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>

<b>3.1 Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>30</b>
<b>3.2 Waktu dan Tempat Penelitian .....</b>	<b>30</b>
<b>3.3 Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>30</b>
<b>3.4 Unit Analisis.....</b>	<b>31</b>
<b>3.5 Metode Analisis Data .....</b>	<b>31</b>
3.5.1 Alat Analisis <i>Shift-Share</i> (SS) .....	31
3.5.2 Analytical Hierarchy Process (AHP) .....	33
<b>3.5 Definisi Operasional.....</b>	<b>44</b>
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
<b>4.1 Gambaran Umum .....</b>	<b>46</b>
4.1.1 PDRB Kabupaten Cilacap .....	46
4.1.2 Potensi Ekonomi Wilayah .....	49
4.1.3 Kinerja Sektor-sektor Ekonomi Terhadap Total PDRB .....	53
4.1.4 Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Cilacap.....	58
<b>4.2 Hasil Analisis Data .....</b>	<b>59</b>
4.2.1 Analisis <i>Shift-Share</i> (SS) .....	59
4.2.2 Analisis Metode <i>Analitycal Hierarchy Process</i> (AHP) .....	62
<b>4.3 Pembahasan .....</b>	<b>64</b>
<b>BAB 5. PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>71</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>77</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Peranan PDRB ADHB menurut lapangan usaha (persen) dengan Migas tahun 2011-2015.....	<b>6</b>
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	<b>27</b>
Tabel 3.1	Formula Matriks <i>Pair-Wise Comparison</i> .....	<b>39</b>
Tabel 3.2	Skala perbandingan Saaty .....	<b>40</b>
Tabel 3.3	Nilai Random Indeks (RI).....	<b>41</b>
Tabel 4.1	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) ADHK tanpa migas tahun 2011-2015.....	<b>48</b>
Tabel 4.2	PDRB Perkapita Kabupaten Cilacap Tahun 2010-2015 .....	<b>49</b>
Tabel 4.3	Analisis Shift-Share Klasik untuk Kabupaten Cilacap tahun 2011-2015 .....	<b>60</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Pertumbuhan ekonomi menurut Provinsi di Pulau Jawa tahun 2015-2016 .....	2
Gambar 2.1	Kerangka Konseptual .....	29
Gambar 4.1	Peta Kabupaten Cilacap .....	46
Gambar 4.2	Pertumbuhan Penduduk Di Kabupaten Cilacap Tahun 2009-2013.....	50
Gambar 4.3	Banyaknya Pencari Kerja Yang Terdaftar Pada Kantor DEPNAKER Cilacap Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2013.....	51
Gambar 4.4	Bobot Final Hirarki Strategi Kebijakan Perencanaan Wilayah....	63

**DAFTAR LAMPIRAN**

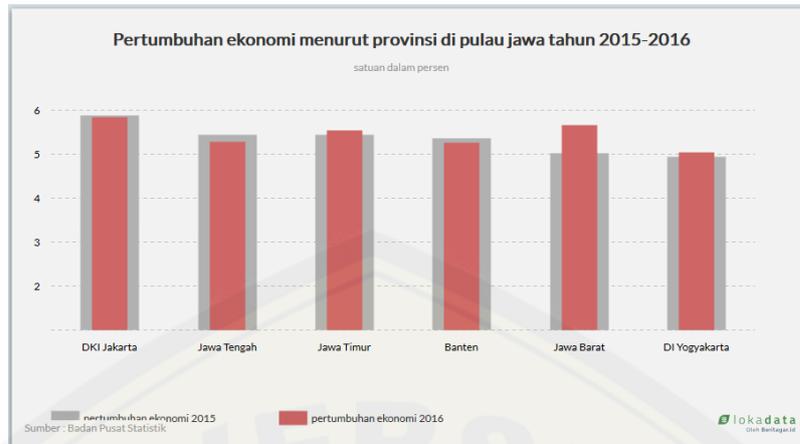
Lampiran A	PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK Tahun 2010-2015.....	78
Lampiran B	PDRB Kabupaten Cilacap ADHK Tahun 2010-2015.....	79
Lampiran C	Perhitungan Shift-Share Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2015.....	80
Lampiran D	Rata-rata Kinerja Sektor Ekonomi Pada Pertumbuhan Ekonomi.....	85
Lampiran E	KUESIONER ANALITICAL HIERARCHI PROCESS (AHP).....	86
Lampiran F	Niali Geomean Kriteria Kebijakan Perencanaan Pembangunan Wilayah Kabupaten Cilacap Hirarki II.....	137
Lampiran G	Niali Geomean Kriteria Kebijakan Perencanaan Pembangunan Wilayah Kabupaten Cilacap Hirarki III.....	138
Lampiran H	Nilai Geomen Aspek Prioritas Kebijakan Perencanaan Pembangunan wilayah Kabupaten Cilacap Hirarki IV.....	139
Lampiran I	Matriks Pair-Wise dan Matriks Priority Kriteria Hirarki II.....	140
Lampiran J	Matriks Pair-Wise dan Matriks Priority Kriteria Hirarki III.....	141
Lampiran K	Matriks Pair-Wise dan Matriks Priority Kriteria Hirarki IV.....	142
Lampiran L	Bobot Level Pertama, Level Kedua, dan Level Ketiga (Bobot Final).....	143

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam pembangunan suatu negara sangat diperlukan pertumbuhan ekonomi, karena dalam pertumbuhan ekonomi terdapat proses peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan barang dan jasa ini juga nantinya akan membawa pertumbuhan ekonomi dalam peningkatan hasil produksi dan pendapatan suatu negara (Sirojuzilam dan Mahali, 2010). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pemerintah yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Peningkatan taraf hidup masyarakat dalam jangka panjang melalui pertumbuhan ekonomi adalah tujuan pembangunan ekonomi setiap negara (Supriana, 2008). Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2016 mencapai 5,02% ini merupakan prosentase lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2015 mencapai 4,88% (Badan Pusat Statistika, 2016).

Suatu negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika negara itu pada tingkat kegiatan ekonomi sekarang jauh lebih tinggi dibandingkan oleh tingkat kegiatan ekonomi sebelumnya. Meningkatnya pertumbuhan suatu negara tidak lepas dari perekonomian suatu daerah, yang memang memberikan kontribusi sangat besar untuk pendapatan negara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 Pulau Jawa menjadi wilayah penyumbang kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tertinggi yaitu mencapai 58,49 persen dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,59 persen (BPS, 2016). Perekonomian daerah memang sedang menjadi perhatian pemerintah karena melalui perekonomian daerah merupakan salah satu cara yang akan mengantarkan Indonesia meningkatkan perekonomian negara.



Gambar 1.1 Pertumbuhan ekonomi menurut Provinsi di Pulau Jawa tahun 2015-2016

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Gambar 1.1 kontribusi pertumbuhan ekonomi pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2016 pada provinsi DKI Jakarta memberikan kontribusi sebesar 5,85 persen, provinsi Jawa Tengah memberikan kontribusi sebesar 5,28 persen, provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi sebesar 5,44 persen, provinsi Banten memberikan kontribusi sebesar 5,26 persen, provinsi Jawa Barat memberikan kontribusi sebesar 5,67 persen, dan provinsi DI Yogyakarta memberikan kontribusi sebesar 5,05 persen. Provinsi yang memberikan kontribusi sedikit terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yaitu, DI Yogyakarta, Banten, dan Jawa Tengah. Jawa Tengah menjadi sorotan dalam kontribusi pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, dengan kondisi luas wilayah cukup besar, namun kontribusi yang diberikan terhadap pertumbuhan nasional tergolong rendah dibandingkan dengan Jawa Timur dan Jawa Barat. Jawa Tengah memiliki 29 Kabupaten dan 6 kota, masing-masing memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Di tahun 2011-2013 kontribusi terbesar dalam PDRB Jawa Tengah disumbangkan oleh 3 daerah yaitu Kota Semarang, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kudus.

Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi

dalam wilayah tersebut (Lincoln Arsyad, 2010). Dalam pembangunan ekonomi daerah pasti terdapat permasalahan yang dihadapi tiap masing-masing wilayah yaitu pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada karakteristik daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi.

Kebijakan pembangunan daerah tidak lepas dari otonomi daerah yang berperan untuk mewujudkan keserasian antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar mencapai keselarasan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan daerah. Menurut UU No. 32 tahun 2004 bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pembangunan daerah juga tidak terlepas dari isu daya saing. Konsep pada daya saing kerap dikaitkan dengan kemampuan perusahaan, kota, daerah, wilayah atau negara dalam mempertahankan ataupun meningkatkan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan (Porter, 2002). Menurut Tambunan (2011) keunggulan kompetitif adalah suatu keunggulan yang dapat diciptakan dan dikembangkan, hal ini merupakan ukuran daya saing suatu aktifitas kemampuan suatu daerah untuk memasarkan produknya diluar daerah. Sedangkan definisi daya saing daerah menurut Huggins (2007) adalah kemampuan dari perekonomian dalam menarik dan mempertahankan perusahaan-perusahaan pada kondisi yang stabil atau pada pangsa pasar yang meningkat dalam aktivitasnya, dengan tetap

mempertahankan atau meningkatkan standar kehidupan untuk semua yang terlibat di dalamnya (Huggins, 2007 dalam PPSK BI, 2008). Dengan kata lain pada pengertian ini memiliki makna bahwa kondisi perekonomian yang kondusif menjadi syarat mutlak terhadap peningkatan daya saing daerah. Menurut Halwani (2002) dalam menghadapi globalisasi ekonomi atau pasar yang bersifat global, dimana suatu masyarakat akan bertahan apabila memiliki daya saing yang tinggi, atau suatu daerah akan tetap bertahan jika daerah itu memiliki daya saing, dengan melalui potensi yang dimiliki oleh daerah. Dengan demikian dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah perlu dikembangkan sentra-sentra ekonomi daerah yang di desain dengan menggunakan standar internasional. Pemerintah daerah juga harus memiliki kesiapan secara sungguh-sungguh dalam menata pengembangan kelembagaan, mempertajam kebijakan pemerintah daerah, memperkuat sumberdaya manusia aparatur (birokrasi) dan masyarakat daerah, sehingga pemberdayaan ekonomi daerah secara menyeluruh menjadi kunci dalam pembangunan ekonomi daerah yang memiliki ekonomi yang tinggi pada era globalisasi ekonomi. Menurut Tarigan (2005) seorang perencana wilayah harus memiliki kemampuan untuk menganalisa potensi ekonomi wilayahnya. Dalam hal ini kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor mana sajakah yang memiliki keunggulan untuk dapat dikembangkan yang diharapkan mampu mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang.

Pada tahun 2014 Badan Pusat Statistik mengeluarkan pernyataan bahwa “Pada setelah Februari 2015 BPS akan menghilangkan perhitungan Produk Domestik Bruto berdasarkan tahun dasar 2000 dan menggantikannya dengan PDB tahun dasar 2010. Pada tahun dasar 2000 klasifikasi PDB ada 9 indikator, sedangkan untuk tahun dasar 2010 klasifikasi PDB ada 17 sektor”. Tahun dasar 2000, klasifikasi PDB ada 9 sektor, yaitu: (1) Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. (2) Pertambangan dan penggalan. (3) Industri pengolahan. (4) Listrik, gas, dan air bersih. (5) Konstruksi. (6) Perdagangan, hotel, dan Restoran. (7) Pengangkutan dan komunikasi. (8) Keuangan, *real estate* dan jasa keuangan. (9) Jasa-jasa. Untuk yang tahun dasar 2010, klasifikasi PDB ada 17 sektor, yaitu: (1) Pertanian, kehutanan, dan perikanan. (2) Pertambangan dan pengolahan. (3)

Industri pengolahan. (4) Pengadaan listrik dan gas. (5) Pengadaan air. (6) Konstruksi. (7) Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. (8) Transportasi dan pergudangan. (9) Penyediaan akomodasi dan makan minum. (10) Informasi dan komunikasi. (11) Jasa Keuangan. (12) Real estate. (13) Jasa perusahaan. (14) Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. (15) Jasa pendidikan. (16) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial. (17) Jasa lainnya (BPS, 2014).

Kabupaten Cilacap memiliki luas wilayah cukup besar serta berbagai keadaan topografi dan faktor pendukung lingkungan yang berbeda-beda, hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap ketersediaan potensi sumberdaya alam yang ada. Potensi sumber daya alam di Kabupaten Cilacap yang ada meliputi dalam kawasan pesisir, dalam kawasan dataran rendah, serta potensi sumberdaya alam pada kawasan pedalaman atau wilayah dataran tinggi atau perbukitan, yang masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, dan pula dalam pemanfaatannya serta dalam pengelolaannya pastinya akan berbeda-beda pula.

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Cilacap memberikan peranan besar terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk kinerja sektoral di Kabupaten Cilacap dilihat selama kurun waktu 2011-2015 yaitu pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,13%. Sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan selalu mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Sektor listrik dan gas mengalami penurunan yaitu sebesar 0,68%. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang pada tahun 2011 memberikan pengaruh sebesar 16,97%, di tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 0,61% menjadi 16,35%, hal yang sama terjadi lagi pada tahun 2013 penurunan yang terjadi sebesar 0,32%, namun tahun 2014 dan 2015 sektor ni mengalami peningkatan yaitu masing-masing sebesar 17,13% dan 17,15%.

Sektor kontruksi memberikan pengaruh terhadap PDRB Kabupaten Cilacap sebesar 15,67%; 16,34%; 16,69%, 17,31%; 18,80% selama kurun waktu 2011-2015 yang berarti selalu mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami

kenaikan juga pada setiap tahunnya. Kenaikan juga dialami oleh sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor informasi dan komunikasi; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor real estate; sektor jasa perusahaan; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; sektor jasa pendidikan; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan sektor jasa lainnya, mengalami peningkatan terhadap pengaruh PDRB Kabupaten Cilacap yang dilihat selama kurun waktu 2011-2015.

Tabel 1.1 Peranan PDRB ADHB menurut lapangan usaha (persen) dengan Migas tahun 2011-2015

Lapangan Usaha		2011	2012	2013	2014	2015
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,85	8,95	8,76	8,62	8,63
B	Pertambangan dan Penggalian	2,19	2,44	2,38	2,72	3,00
C	Industri Pengolahan	71,90	68,63	69,34	68,26	67,24
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03
F	Konstruksi	4,44	4,96	4,73	4,90	5,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,91	5,16	4,92	4,98	5,10
H	Transportasi dan Perdagangan	1,94	2,15	2,19	2,38	2,45
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,85	0,94	0,91	0,98	1,01
J	Informasi dan Komunikasi	1,18	1,31	1,23	1,36	1,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,75	0,83	0,81	0,85	0,88
L	Real Estat	0,68	0,75	0,73	0,78	0,81
M,N	Jasa Perusahaan	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,07	1,19	1,16	1,15	1,16
P	Jasa Pendidikan	1,19	1,55	1,65	1,75	1,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,25	0,30	0,31	0,35	0,37
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,61	0,64	0,65	0,71	0,72
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Cilacap menunjukkan kinerja cukup baik terhadap PDRB Kabupaten Cilacap yaitu selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, hal ini seharusnya bisa membawa perekonomian Kabupaten Cilacap menjadi lebih baik yang dapat mensejahterakan

masyarakatnya. Namun yang menjadi permasalahan potensi sektoral tersebut pada kendala pemanfaatan sumberdaya alam yang berakar pada kemampuan masyarakat dalam mengelola. Dalam mendorong perekonomian Kabupaten Cilacap pada titik kesejahteraan maka pengoptimalan seluruh kinerja sektor potensial yang ada di daerah tersebut harus di kembangkan agar menjadi sektor ekonomi yang memiliki daya saing. Faktor-faktor yang menjadi penentu terhadap daya saing juga menjadi hal penting terhadap pencapaian Perekonomian Kabupaten Cilacap, sehingga kebijakan-kebijakan terhadap perekonomian juga dapat menjadi strategi dalam memperkuat daya saing dengan mempertimbangkan persoalan yang menghambat kegiatan Perekonomian Kabupaten Cilacap.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dari fenomena dan kondisi Kabupaten Cilacap pada latar belakang di atas maka dapat ditarik permasalahan yang menjadi akar masalah dalam perekonomian daerah dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Sektor ekonomi apa yang dapat mendorong dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana strategi pertumbuhan ekonomi dalam memperkuat daya saing Kabupaten Cilacap?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sektor ekonomi yang dapat mendorong dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Cilacap.
2. Untuk menganalisis strategi pertumbuhan ekonomi dalam memperkuat daya saing ekonomi Kabupaten Cilacap.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Bagi Akademis :

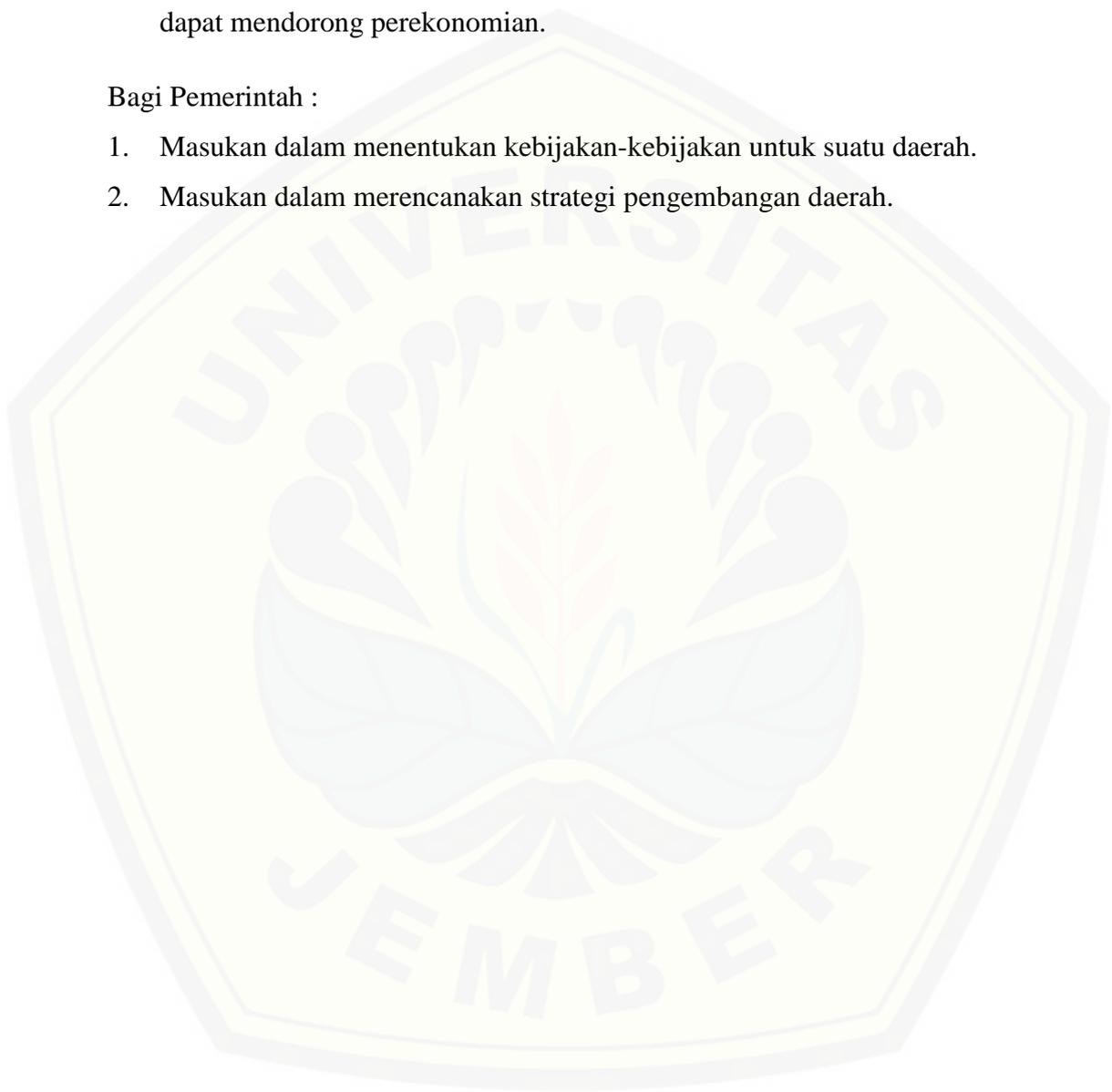
1. Memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai kondisi perekonomian Kabupaten Cilacap.
2. Memberikan pengetahuan cara menentukan sektor potensial dan strategi perekonomian daerah.

Bagi Masyarakat :

1. Mengetahui potensi daerah yang mempunyai daya saing ekonomi untuk kemajuan perekonomian daerah.
2. Mendapatkan wawasan bagaimana caranya mengelola potensi daerah yang dapat mendorong perekonomian.

Bagi Pemerintah :

1. Masukan dalam menentukan kebijakan-kebijakan untuk suatu daerah.
2. Masukan dalam merencanakan strategi pengembangan daerah.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Arsyad (2000) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi daerah secara langsung ataupun tidak langsung akan menciptakan lapangan kerja. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambahan yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, ataupun merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (BPS, 2016).

Tarigan (2005) pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi *transferpayment*, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapatkan aliran dana dari luar wilayah.

##### a. Teori pertumbuhan ekonomi klasik

Menurut Adam Smith (1776) bahwa masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi apa yang dirasakan terbaik untuk dilakukan. Menurut Smith bahwa pertumbuhan ekonomi disebabkan karena faktor kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Kemajuan teknologi tergantung pada pembentukan modal. Dengan adanya akumulasi modal akan memungkinkan dilakukannya spesialisasi atau pembagain kerja sehingga produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan. Dampaknya akan mendorong penambahan investasi dan persediaan modal (*capital stock*), yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan kemajuan teknologi dan menambah pendapatan.

Bertambahnya pendapatan berarti meningkatkan kesejahteraan penduduk. Peningkatan kemakmuran mendorong bertambahnya jumlah penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan berlakunya hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang (*law of diminishing returns*), yang selanjutnya akan menurunkan akumulasi modal (Rahardjo, 2005).

Adam Smith mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi, yaitu antara lain :

a. Pertumbuhan output total

Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara menurut Adam Smith ada tiga, yaitu :

1. Sumberdaya alam yang terjadi (faktor produksi tanah)

Menurut Adam Smith, sumberdaya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan suatu masyarakat. Jumlah sumberdaya alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan suatu negara, yang dimaksud adalah jika sumberdaya ini belum digunakan sepenuhnya maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada memegang peranan dalam pertumbuhan *output*. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumberdaya alam tersebut telah digunakan secara penuh.

2. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan *output*, yaitu jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat.

3. Stok barang modal

Stok modal merupakan unsur produktif yang secara aktif menentukan pertumbuhan *output*. Peranannya sangat sentral dalam proses pertambahan output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal (sampai batas maksimal dari sumberdaya alam).

b. Pertumbuhan Penduduk

Menurut Adam Smith, jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Jika tingkat upah di atas tingkat subsisten, maka orang-orang akan menikah pada usia muda, tingkat kematian menurun, dan jumlah kelahiran akan meningkat. Sebaliknya jika tingkat upah yang berlaku lebih rendah dari tingkat subsisten maka jumlah penduduk akan menurun.

Tingkat upah yang berlaku menurut Adam Smith ditentukan oleh tarik menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran akan tenaga kerja. Tingkat upah yang tinggi dan meningkat jika permintaan akan tenaga kerja tumbuh lebih cepat dari pada penawaran tenaga kerja (Suryana, 2000).

b. Teori pertumbuhan ekonomi Neoklasik

Dalam buku Tarigan (2005) teori pertumbuhan neoklasik dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970). Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah berasal dari tiga sumber yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan skill atau kemajuan teknik sehingga produktivitas perkapita meningkat.

Teori neoklasik sebagai penerus teori klasik menganjurkan agar kondisi selalu diarahkan untuk menuju pasar sempurna. Dalam keadaan pasar sempurna, perekonomian bisa tumbuh maksimal. Kebijakan yang perlu ditempuh adalah meniadakan hambatan dalam perdagangan termasuk perpindahan orang, barang dan modal. Harus dijamin kelancaran arus barang, modal, tenaga kerja dan perlu penyebarluasan informasi pasar. Harus diusahakan terciptanya prasarana perhubungan yang baik dan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan kestabilan politik. Neoklasik berpendapat bahwa dalam perkembangan ekonomi jangka panjang, senantiasa akan muncul kekuatan tandingan (*conter forces*) yang dapat menanggulangi ketidakseimbangan dan mengembalikan penyimpangan kepada keadaan keseimbangan yang stabil sehingga tidak diperlukan intervensi kebijakan pemerintah secara aktif (Rahardjo, 2005).

Model pertumbuhan yang didasarkan pada model pertumbuhan neoklasik ini memiliki kelemahan. Model tersebut tidak bisa menjelaskan mengapa di banyak negara di dunia pertumbuhan ekonominya lebih tinggi daripada yang diperkirakan dalam model ini. Hal ini bisa terjadi, karena model pertumbuhan neoklasik hanya melihat pada satu sumber saja, yaitu kontribusi dari peningkatan jumlah faktor-faktor produksi. Dengan demikian, banyak faktor produksi lain yang tidak dimasukkan ke dalam model tersebut, ternyata sangat menentukan laju pertumbuhan ekonomi di banyak negara. salah satunya yang paling penting adalah teknologi, karena dianggap konstan sehingga tidak dimasukkan ke dalam model (Tambunan, 2001).

### 2.1.2 Teori Daya Saing

#### a. Teori Daya Saing Porter

Teori Porter tentang daya saing nasional berangkat dari keyakinannya bahwa teori ekonomi klasik yang menjelaskan tentang keunggulan komparatif tidak mencukupi, atau bahkan tidak tepat. Menurut Porter, suatu negara memperoleh keunggulan daya saing / *competitive advantage* (CA) jika perusahaan (yang ada di negara tersebut) kompetitif.

Daya saing suatu negara ditentukan oleh kemampuan industri melakukan inovasi dan meningkatkan kemampuannya. Perusahaan memperoleh *competitive advantage* (CA) karena tekanan dan tantangan. Perusahaan menerima manfaat dari adanya persaingan di pasar domestik, *supplier* domestik yang agresif, serta pasar lokal yang memiliki permintaan tinggi. Perbedaan dalam nilai-nilai nasional, budaya, struktur ekonomi, institusi, dan sejarah semuanya memberi kontribusi pada keberhasilan dalam persaingan. Perusahaan menjadi kompetitif melalui inovasi yang dapat meliputi peningkatan teknis proses produksi atau kualitas produk.

Selanjutnya Porter mengajukan *Diamond Model* (DM) yang terdiri dari empat determinan (faktor – faktor yang menentukan) *National Competitive Advantage* (NCA). Empat atribut ini adalah: *factor conditions*, *demand*

*conditions, related and supporting industries, dan firm strategy, structure, and rivalry.*

*Factor conditions* mengacu pada input yang digunakan sebagai faktor produksi, seperti tenaga kerja, sumber daya alam, modal dan infrastruktur. Argumen Porter, kunci utama faktor produksi adalah “diciptakan” bukan diperoleh dari warisan. Lebih jauh, kelangkaan sumber daya (*factor disadvantage*) sering kali membantu negara menjadi kompetitif. Terlalu banyak (sumber daya) memiliki kemungkinan disia-siakan, ketika langka dapat mendorong inovasi.

*Demand conditions*, mengacu pada tersedianya pasar domestik yang siap berperan menjadi elemen penting dalam menghasilkan daya saing. Pasar seperti ini ditandai dengan kemampuan untuk menjual produk-produk superior, hal ini didorong oleh adanya permintaan barang dan jasa berkualitas serta adanya kedekatan hubungan antara perusahaan dan pelanggan.

*Related and Supporting Industries*, mengacu pada tersedianya serangkaian dan adanya keterkaitan kuat antara industri pendukung dan perusahaan, hubungan dan dukungan ini bersifat positif yang berujung pada peningkatan daya saing perusahaan. Porter mengembangkan model dari faktor kondisi semacam ini dengan *industrial clusters atau agglomeration*, yang memberi manfaat adanya *potential technology knowledge spillover*, kedekatan dengan dengan konsumen sehingga semakin meningkatkan *market power*.

*Firm strategy, Structure and Rivalry*, mengacu pada strategi dan struktur yang ada pada sebagian besar perusahaan dan intensitas persaingan pada industri tertentu. Faktor Strategi dapat terdiri dari setidaknya dua aspek: pasar modal dan pilihan karir individu. Pasar modal domestik mempengaruhi strategi perusahaan, sementara individu sering kali membuat keputusan karir berdasarkan peluang dan prestise. Suatu negara akan memiliki daya saing pada suatu industri di mana personel kuncinya dianggap *prestisious*. Struktur mengikuti strategi. Struktur dibangun guna menjalankan strategi. Intensitas persaingan (*rivalry*) yang tinggi mendorong inovasi.

Porter juga menambahkan faktor lain: peran pemerintah dan *chance*, yang dikatakan memiliki peran penting dalam menciptakan *National Competitive*

*Advantage* (NCA). Peran dimaksud, bukan sebagai pemain di industri, namun melalui kewenangan yang dimiliki memberikan fasilitasi, katalis, dan tantangan bagi industri. Pemerintah menganjurkan dan mendorong industri agar mencapai level daya saing tertentu. Hal – hal tersebut dapat dilakukan pemerintah melalui kebijakan insentif berupa subsidi, perpajakan, pendidikan, fokus pada penciptaan dan penguatan *factor conditions*, serta menegakkan standar industri.

Poin utama dari *Diamond Model* (DM), Porter mengemukakan model penciptaan daya saing yang *self-reinforcing*, di mana persaingan domestik menstimulasi tumbuhnya industri dan secara bersamaan membentuk konsumen yang maju (*sophisticated*) yang selalu menghendaki peningkatan dan inovasi. Lebih jauh *Diamond Model* (DM) juga mempromosikan *industrial cluster*. Kontribusi Porter menjelaskan hubungan antara *firm-industry-country*, serta bagaimana hubungan ini dapat mendukung negara dan sebaliknya.

Menurut Porter jika perusahaan ingin meningkatkan usahanya dalam persaingan yang ketat perusahaan harus memiliki prinsip bisnis, Harga yang tinggi, Produk dengan biaya yang rendah, dan bukan kedua - duanya. Berdasarkan prinsip tersebut maka Porter Menyatakan ada tiga Strategi Generik yaitu: *Differentiation*, *Overall Cost Leadership* dan Fokus. Menurut Porter strategi perusahaan untuk bersaing dalam suatu industri dapat berbeda - beda dan dalam berbagai dimensi, Porter mengemukakan tiga belas dimensi yang biasanya digunakan oleh perusahaan dalam bersaing, yaitu: Spesialisasi, Identifikasi Merk, Dorongan Versus Tarikan, Seleksi Saluran, Mutu Produk, Kepeloporan Teknologis, Integrasi Vertikal, Posisi Biaya, Layanan, Kebijakan Harga, *Leverage*, Hubungan dengan Perusahaan Induk, Hubungan dengan Pemerintah.

Di dalam teori persaingan kita mengenal ada suatu teori dari Michael Porter (1990) yang sangat terkenal pada saat menganalisis persaingan atau *competition analysis*. Teori tersebut sangat terkenal dengan istilah *Porter Five Forces Model*. Intinya sebenarnya Porter menilai bahwa perusahaan secara nyata tidak hanya bersaing dengan perusahaan yang ada dalam industri saat ini. Analisis yang biasa digunakan sebuah perusahaan adalah siapa pesaing langsung perusahaan tersebut dan akhirnya mereka terjebak dalam "*competitor oriented* ",

sehingga tidak mempunyai visi pasar yang jelas. Dalam *five forces model* digambarkan bahwa kita juga bersaing dengan pesaing potensial kita, yaitu mereka yang akan masuk, para pemasok atau *supplier*, para pembeli atau konsumen, dan produsen produk-produk pengganti. Dengan demikian, kita harus mengetahui bahwa ada lima kekuatan yang menentukan karakteristik suatu industri, yaitu :

1) Intensitas persaingan antar pemain yang ada saat ini

Yang biasanya menjadi fokus para pemasar adalah masalah intensitas rivalitas atau persaingan antar pemain dalam industri. Biasanya intensitas persaingan itu dipengaruhi banyak faktor, misalnya struktur biaya produk. Misalkan semakin besar porsi biaya tetap dalam struktur biaya, maka semakin tinggi intensitas persaingan. Hal ini disebabkan, setiap penjual memiliki tingkat *break even point* yang tinggi sehingga pada umumnya harus menjual produk dalam jumlah yang besar, dan bila perlu dilakukan “banting harga” agar bisa mencapai tingkat *break even* tersebut.

2) Ancaman masuk pendatang baru

Kekuatan ini biasanya dipengaruhi oleh besar kecilnya hambatan masuk ke dalam industri. Hambatan masuk ke dalam industri itu contohnya antara lain: besarnya biaya investasi yang dibutuhkan, perijinan, akses terhadap bahan mentah, akses terhadap saluran distribusi, ekuitas merek dan masih banyak lagi. Biasanya semakin tinggi hambatan masuk, semakin rendah ancaman yang masuk dari pendatang baru.

3) Kekuatan tawar menawar pemasok.

Biasanya sedikit jumlah pemasok, semakin penting produk yang dipasok, dan semakin kuat posisi tawarnya.

4) Kekuatan tawar pembeli.

Dimana kita bisa melihat bahwa semakin besar pembelian, semakin banyak pilihan yang tersedia bagi pembeli dan pada umumnya akan membuat posisi pembeli semakin kuat.

5) Ancaman produk pengganti.

Kekuatan yang terakhir adalah soal produk –produk substitusi, seberapa banyak produk substitusi di pasar. Ketersediaan produk substitusi yang banyak akan membatasi keleluasaan pemain dalam industri untuk menentukan harga jual produk.

Kelima kekuatan bersaing menurut Porter diatas dapat dikategorikan sebagai faktor eksternal. Definisi dari faktor eksternal perusahaan itu sendiri adalah lingkungan bisnis yang melengkapi operasi perusahaan yang memunculkan peluang dan ancaman. Faktor ini mencakup lingkungan industri dan lingkungan bisnis makro, yang membentuk keadaan dalam organisasi dimana organisasi ini hidup. Elemen-elemen dari Faktor eksternal tersebut adalah pemegang saham, pemerintah, pemasok, komunitas lokal, pesaing, pelanggan, kreditur, serikat buruh, kelompok kepentingan khusus, dan asosiasi perdagangan. Lingkungan kerja perusahaan umumnya adalah industri dimana perusahaan dioperasikan.

Lingkungan bisnis makro atau lingkungan sosial terdiri dari kekuatan umum yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas-aktivitas jangka pendek organisasi tetapi dapat dan sering mempengaruhi keputusan-keputusan jangka panjang. Perusahaan-perusahaan besar membagi lingkungan sosial dalam satu wilayah geografis menjadi empat kategori, terdiri dari faktor ekonomi, sosiokultural, teknologi dan politik-hukum dalam hubungannya dengan lingkungan perusahaan secara keseluruhan.

Sehingga apabila dilihat dari penjelasan mengenai definisi Faktor Eksternal perusahaan dikaitkan dengan *5 kekuatan bersaing M. Porter*, maka 5 kekuatan bersaing Porter merupakan Faktor Eksternal. Penjelasan lebih lanjut mengenai analisis Faktor Eksternal adalah faktor ini dibagi menjadi dua, yakni Peluang (*opportunities*) dan Ancaman (*threats*). Ancaman adalah suatu kondisi dalam lingkungan umum yang dapat menghambat usaha-usaha perusahaan untuk mencapai daya saing strategis. Sedangkan peluang adalah kondisi dalam lingkungan umum yang dapat membantu perusahaan mencapai daya saing strategis.

### 2.1.3 Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Arsyad (1997) mengartikan pembangunan ekonomi daerah sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi dengan wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan intuisi-intuisi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perudahaan-perusahaan baru (Arsyad, 1997).

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber-sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya-sumberdaya swasta secara bertanggung jawab. Dalam pembangunan ekonomi daerah diperlukan campur tangan pemerintah. Apabila pembangunan daerah diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar maka pembangunan dan hasilnya tidak dapat dirasakan oleh seluruh daerah secara merata (Arsyad, 1997).

### Teori Pembangunan Schumpeter

Teori pembangunan ekonomi, Schumpeter lebih menekankan pada peranan pengusaha dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Schumpeter memisalkan bahwa dalam perekonomian tidak terjadi pengembangan, maka perekonomian berada dalam keadaan tidak berkembang. Keadaan ini disadari oleh para pengusaha, yang selanjutnya akan meminjam modal dan menggunakan faktor-faktor produksi lainnya untuk melaksanakan dan menciptakan berbagai pembaharuan. Pembaharuan tersebut dapat melahirkan pengusaha-pengusaha baru yang pada akhirnya akan tercipta kegiatan yang sangat aktif dalam penanaman modal, dan hal ini akan mengakibatkan terciptanya tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi (Sukirno, 2006).

Menurut Schumpeter, penambahan pendapatan negara dari masa ke masa, perkembangannya sangat tidak stabil dan keadaannya sangat ditentukan oleh besarnya kemungkinan untuk menjalankan pembentukan modal yang menguntungkan yang akan dilakukan oleh para pengusaha. Schumpeter berkeyakinan bahwa pembangunan ekonomi terutama diciptakan oleh inisiatif dari golongan pengusaha yang inovatif atau golongan *entrepreneur* yaitu dari golongan masyarakat yang menciptakan inovasi atau pembaruan dalam perekonomian. Pembaruan-pembaruan dapat diciptakan oleh pengusaha dalam beberapa bentuk, yaitu:

- 1) Memperkenalkan barang baru
- 2) Penggunaan cara baru dalam memproduksi barang
- 3) Memperluas pasar barang
- 4) Mengembangkan sumber bahan mentah baru
- 5) Mengadakan reorganisasi dalam perusahaan atau industri

Kegiatan pembaruan oleh para pengusaha akan mempertinggi pendapatan masyarakat dan menaikkan tingkat konsumsi. Kenaikan tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk memperbesar tingkat produksinya dan mengadakan penanaman modal baru yang juga akan berdampak terhadap perekonomian nasional.

#### 2.1.4 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan suatu keputusan yang dimaksud untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah (Mustopadidjaja, 2002).

a. Teori Kebijakan Publik Chief J.O. Udoji (1981)

Kebijaksanaan publik sebagai “*An sanctioned course of actin addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large*”. Maksudnya ialah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mengemukakan bahwa studi kebijakan publik mempelajari keputusan-keputusan Pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah *information failures, complex implementation failures* (Hakim, 2002).

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi: pembuatan kebijakan, pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi kebijakan.

Munurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Proses dalam formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai berikut :

- 1) Pengkaji persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.
- 2) Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.

- 3) Perumusan alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- 4) Penyusunan model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.
- 5) Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisiten utnuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan.
- 6) Penialian alternatif. Penilaian alternstif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitasdan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.
- 7) Perumusan rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.

#### 2.1.5 Teori Perencanaan Wilayah

Perencanaan Wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada azas prioritas (Riyadi dan Bratakusumah, 2003).

Perencanaan wilayah merupakan satu-satunya jalan yang terbuka untuk menaikkan pendapatan perkapita, mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesempatan kerja (Jhingan, 2000). Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku, baik umum (publik) atau pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial, ekonomi dan aspek lingkungan lainnya dengan cara :

- 1) Secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah
- 2) Merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah
- 3) Menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah (solusi), dan
- 4) Melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan (Solihin, D, 2005).

#### Teori Perencanaan Wilayah Fianstein dan Norman

Menurut Fianstein dan Norman (1991) tipologi perencanaan dibagi atas empat macam yang didasarkan pada pemikiran teoritis. Empat macam perencanaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) *Traditional planning* (perencanaan tradisional). Pada jenis perencanaan ini perencana menetapkan maksud dan tujuan untuk merubah sebuah sistem kota yang telah rusak. Biasanya pada konsep perencanaan ini membuat kebijakan-kebijakan untuk melakukan perbaikan pada sistem kota. Pada perencanaan program inovatif terhadap perbaikan lingkungan perkotaan dengan menggunakan standar dan metode yang profesional.
- 2) *User-oriented planning* (Perencanaan yang berorientasi pada pengguna). Konsep perencanaan ini adalah membuat perencanaan yang bertujuan untuk mengakomodasi pengguna dari produk perencanaan tersebut, dalam hal ini masyarakat kota. Masyarakat yang menentukan produk perencanaan harus dilibatkan dalam setiap proses perencanaan.
- 3) *Advocacy planning* (Perencanaan Advokasi). Pada perencanaan ini berisikan program pembelaan terhadap masyarakat yang termarginalkan dalam proses pembangunan kota dalam hal ini adalah masyarakat miskin kota. Pada perencanaan advokasi akan meberikan perhatian khusus terhadap melalui program khusus guna meningkatkan taraf hidup masyarkat miskin.
- 4) *Incremental planning* (Perencanaan dukungan). Pada perencanaan yang bersifat dukungan terhadap sebuah proses pengambilan keputusan

terhadap permasalahan-permasalahan perkotaan. Produk perencanaan ini bersifat analisis yang mendalam terhadap permasalahan dengan mempertimbangkan dampak positif dan dampak negatif sebuah kebijakan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Paicakra Prianti Inggrita Gusti Sari Nasution, SE, M.Si (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Daya Saing Ekonomi Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan petunjuk dalam pengembangan yang lebih lanjut di Daerah dari analisis skor daya saing. Metode analisis yang digunakan dalam penelitiannya adalah pendekatan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Hasil dari penelitiannya adalah pembobotan dan pemeringkatan, faktor utama penentu daya saing ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah faktor infrastruktur fisik ekonomi diikuti oleh faktor perekonomian daerah. Kemudian faktor tenaga kerja dan produktivitas, kemudian faktor kelembagaan dan yang terakhir faktor sosial politik.

Sutikno dan Maryani (2007) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Potensi dan Daya Saing Kecamatan sebagai Pusat Pertumbuhan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Kabupaten Malang”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor dan pola pertumbuhan serta sektor dan sub sektor ekonomi unggulan di masing-masing Satuan Wilayah Pengembangan, dan menentukan potensi dan daya saing masing-masing kecamatan sebagai prioritas pusat pertumbuhan pada masing-masing Satuan Wilayah Pengembangan (SWP). Metode analisis yang digunakan adalah Tipologi Klassen, Analisis *Location Quotient* (LQ), Analisis *Shift-Share* (SS), Analisis *Scalogram*, dan Analisis Daya Saing. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan Analisis Tipologi Klassen diperoleh 4 klasifikasi SWP. Berdasarkan Analisis *Location* dan Analisis *Shift-Share*, maka diperoleh gambaran sektor unggulan di masing-masing SWP. Berdasarkan Analisis *Scalogram*, Daya Saing, dan Jarak, maka diperoleh gambaran pusat-pusat pertumbuhan dimasing-masing SWP.

Rizal Endi, I Wayan Suparta, dan Muhammad Husaini (2015) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Sektor Unggulan dan Pengembangan Wilayah

Di Kota Bandar Lampung 2000-2012”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor unggulan dalam struktur perekonomian Kota Bandar Lampung sebagai bahan Informasi dan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan dan strategi pengembangan wilayah. Metode analisis yang digunakan adalah Tipologi Klassen, Analisis *Location Quotient* (LQ), dan *Shift-Share* (SS). Hasil dari penelitian berdasarkan kriteria untuk menentukan suatu sektor unggulan adalah sektor yang maju dan tumbuh pesat, basis, dan kompetitif maka sektor/subsektor/sub-sub sektor ekonomi yang masuk dalam katagori tersebut adalah a) sektor ekonomi terdiri dari : sektor industri pengolahan, sektor keuangan, *real estate*, dan jasa perusahaan. b) subsektor ekonomi yaitu : industri bukan migas. c) sub-sub sektor ekonomi yaitu : barang kayu dan hasil hutan lainnya, semen dan barang galian bukan logam, logam dasar besi dan baja, angkutan laut, dan jasa pemerintahan lainnya.

Samuel Johanis Atama (2016) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Potensi Ekonomi Lokal untuk Pengembangan dan Penguatan Daya Saing Daerah Di Kabupaten Alor Tahun 2009-2013”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi ekonomi lokal di Kabupaten Alor, yang dilakukan dengan menelaah PDRB untuk melihat adanya potensi basis dan non basis. Metode analisis yang digunakan Analisis *Location Quotient* (LQ), Analisis *Shift-Share* (SS), Model Rasio Pertumbuhan dan *Overlay*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sektor listrik, gas, dan air minum; industri pengolahan serta jasa-jasa merupakan sektor unggulan di Kabupaten Alor dengan nilai  $LQ > 1$ . Ada pun sektor pertanian memiliki  $LQ < 1$  namun perannya terhadap pembentukan PDRB serta perekonomian Kabupaten Alor cukup besar. Sub sektor pertanian yang potensial untuk di kembangkan yaitu sub sektor perikanan laut, tanaman pangan, perkebunan serta peternakan.

Damiana Simanjuak dan Sirojuzilam (2013) melakukan penelitian dengan judul “Potensi Wilayah dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kabupaten Toba Samosir”. Penelitian bertujuan untuk menentukan potensi wilayah dan strategi pengembangan wilayah Kabupaten Toba Samosir kawasan Agropolitan. Metode analisis yang digunakan Analisis *Location Quotient* (LQ),

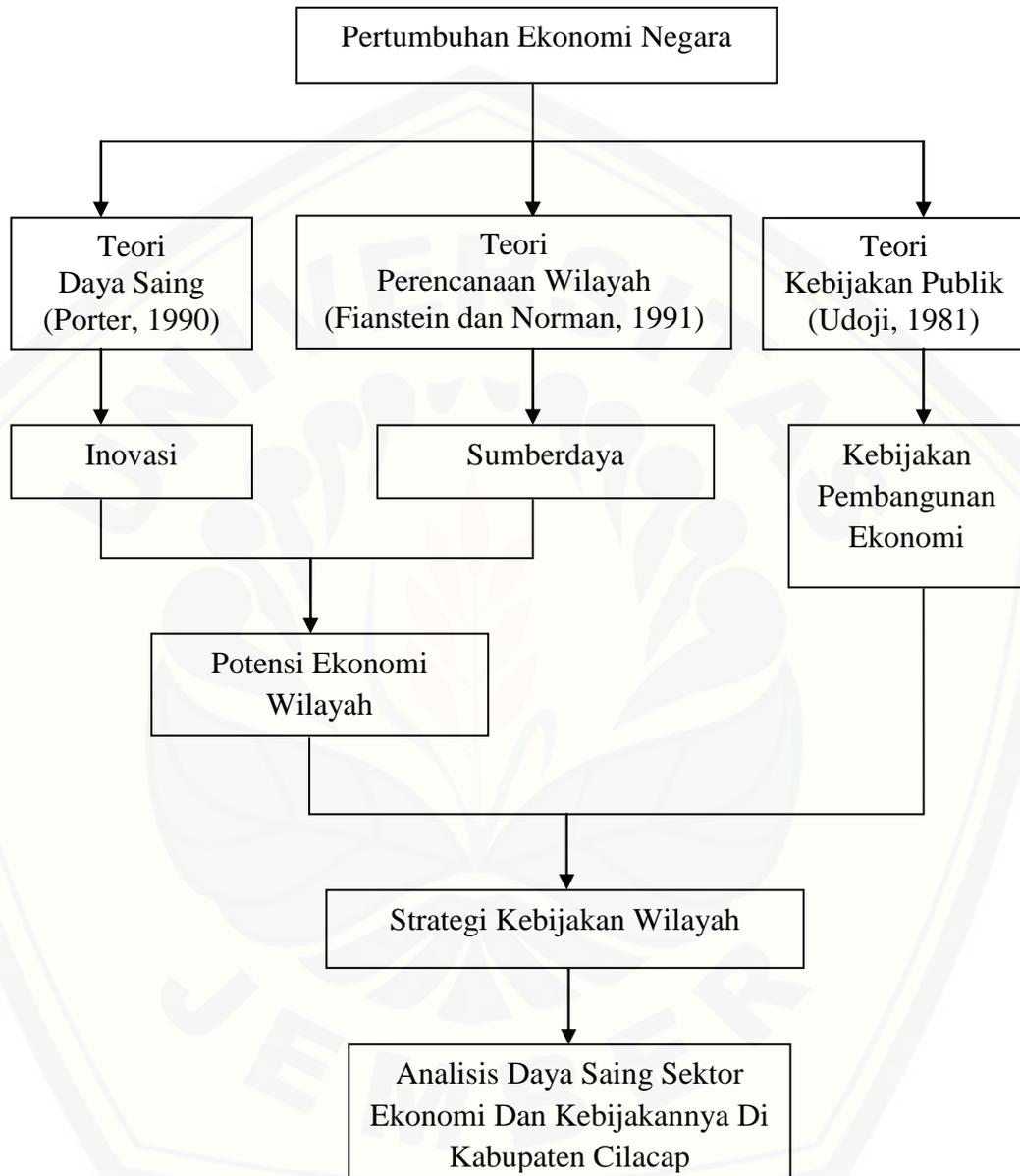
Analisis *Shift-Share* (SS) dan Analisis *Strenght, Weakness, Opportunities dan Threats* (SWOT). Hasil dari penelitian berdasarkan hasil perhitungan alat analisis potensi wilayah yaitu indeks *Location Quotient* dan analisis *Shift-Share* menunjukkan bahwa sektor yang merupakan sektor unggulan dengan kriteria tergolong ke dalam sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat, sektor basis dan kompetitif, yaitu sektor pertanian dan sektor industri. Strategi pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Toba Samosir berdasarkan analisis *Strenght, Weakness, Opportunities dan Threats* (SWOT) adalah : a) mengembangkan sektor potensial yaitu sektor pertanian dan sektor industri, dimana sektor pertanian didukung oleh sektor industri dalam pengembangan agropolitan, b) membenahi permodalan dan penididikan pertanian dengan cara menjalin hubungan dengan pihak swasta dalam berinvestasi, c) memeanfaatkan kewenangan pemerintah untuk mengoptimalkan sumberdaya yang ada dengan membuat kebijakan untuk mengembangkan potensi pertanian, d) pemanfaatan lahan secara optimal melalui pengembangan komoditas pertanian, e) membenahi sarana dan prasarana dan mengadakan pelatihan atau penyuluhan pada masyarakat tentang teknologi pertanian serta pemasaran.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Alat Analisis	Hasil
1	Paicakra Prianti Inggrita Gusti Sari Nasution, SE, M.Si (2015)	Analisis Daya Saing Ekonomi Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Pendekatan <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP)	Dari hasil pembobotan dan pemeringkatan, faktor utama penentu daya saing ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah faktor infrastruktur fisik diikuti oleh faktor perekonomian daerah. Kemudian faktor tenaga kerja dan produktivitas, kemudian faktor kelembagaan dan yang terakhir faktor sosial politik.
2	Sutikno dan Maryunani (2007)	Analisis Potensi dan Daya Saing Kecamatan sebagai Pusat Pertumbuhan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Kabupaten Malang	Analisis Tipologi Klassen, Analisis <i>Location Quotient</i> , Analisis <i>Shift-Share</i> , Analisis <i>Scalogram</i> , dan Analisis Daya Saing	Berdasarkan Analisis Tipologi Klassen diperoleh 4 klasifikasi SWP.  Berdasarkan Analisis <i>Location Quotient</i> dan Analisis <i>Shift-Share</i> , maka diperoleh gambaran sektor unggulan di masing-masing SWP.  Berdasarkan Analisis <i>Scalogram</i> , Daya Saing, dan Jarak, maka diperoleh gambaran pusat-pusat pertumbuhan dimasing-masing SWP.
3	Rizal Endi, I Wayan Suparta, dan Muhammad Husaini (2015)	Anlasis Sektor Unggulan dan Pengembangan Wilayah Di Kota Bandar Lampung 2000- 2012	Analisis Klassen Tipologi, Analisis <i>Location Quotient</i> , dan Analisis <i>Shift-Share</i>	Berdasarkan kriteria untuk menentukan suatu sektor unggulan adalah sektor yang maju dan tumbuh pesat, basis, dan kompetitif maka sektor/subsektor/sub-sub sektor ekonomi yang masuk dalam katagori tersebut adalah a) sektor ekonomi terdiri dari : sektor industri pengolahan, sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. b)subsektor ekonomi yaitu : industri bukan migas. c) sub-sub sektor ekonomi yaitu : barang kayu dan hasil hutan lainnya, semen dan barang galian bukan logam, logam dasar besi dan baja, angkutan laut, dan jasa pemerintahan lainnya.
4	Samuel Johanis Atama (2016)	Analisis Potensi Ekonomi Lokal Untuk Pengembangan dan Penguatan Daya Saing Daerah	Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ), Analisis <i>Shift-Share</i> (SS), Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP), Analisis <i>Overlay</i>	Berdasarkan analisis LQ, sektor yang paling potensial dikembangkan adalah sektor industri pengolahan; listrik, gas dan air minum; serta sektor jasa-jasa yang memiliki LQ > 1. Berdasarkan hasil analisis overlay, sektor pertanian

		Di Kabupaten Alor Tahun 2009-2013		memiliki pertumbuhan yang baik. Walaupun tidak termasuk sektor basis namun sektor pertanian memiliki potensi yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Alor. Sub sektor pertanian yang potensial untuk di kembangkan adalah sub sektor perikanan, sub sektor tanaman pangan, sub sektor peternakan.
5	Damiana Simanjuntak dan Sirojuzilam (2013)	Potensi Wilayah Dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kabupaten Toba Samosir	Analisis <i>Location Quotient</i> , Analisis <i>Shift-Share</i> , dan Analisis <i>Strenght, Weakness, Opportunities dan Threats</i> (SWOT)	Berdasarkan hasil perhitungan alat analisis potensi wilayah yaitu indeks <i>Location Quotient</i> dan analisis <i>Shift-Share</i> menunjukkan bahwa sektor yang merupakan sektor unggulan dengan kriteria tergolong ke dalam sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat, sektor basis dan kompetitif, yaitu sektor pertanian dan sektor industri. Strategi pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Toba Samosir berdasarkan analisis <i>Strenght, Weakness, Opportunities dan Threats</i> (SWOT) adalah : a) mengembangkan sektor potensial yaitu sektor pertanian dan sektor industri, dimana sektor pertanian didukung oleh sektor industri dalam pengembangan agropolitan, b) membenahi permodalan dan penididikan pertanian dengan cara menjalin hubungan dengan pihak swasta dalam berinvestasi, c) memeanfaatkan kewenangan pemerintah untuk mengoptimalkan sumberdaya yang ada dengan membuat kebijakan untuk mengembangkan potensi pertanian, d) pemanfaatan lahan secara optimal melalui pengembangan komoditas pertanian, e) membenahi sarana dan prasarana dan mengadakan pelatihan atau penyuluhan pada masyarakat tentang teknologi pertanian serta pemasaran.

### 2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

## **BAB 3. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder dan primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait bukan dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya (tidak melalui perantara). Sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah (BPS) dan Badan Pusat Statistika Kabupaten Cilacap, yang digunakan untuk penelitian ini berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun dasar 2010 ADHK. Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap (SETDA) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan (BAPPELITBANGDA).

### **3.2 Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini membutuhkan waktu 2 bulan yaitu selama bulan Mei – Juli 2017 dalam memperoleh kelengkapan bahan penelitian, sedangkan tempat untuk penelitian berada di Kabupaten Cilacap.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan studi dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya momentual dari sebuah perusahaan. Untuk saat ini dokumen yang digunakan peneliti adalah dokumen tertulis. Untuk teknik pengumpulan data primer menggunakan kuesioner. Kuesioner yang telah diperoleh selanjutnya diselesaikan dengan mencari prioritas bobot dari suatu pemecahan masalah dan menghasilkan suatu kebijakan baru untuk Kabupaten Cilacap.

### 3.4 Unit Analisis

Unit analisis pada penelitian ini adalah sektor-sektor yang membentuk PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar 2010 dan PDRB kontribusi dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang; Kontruksi; Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan Sepeda motor; Transportasi dan Perdagangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya. Disamping unit analisis tersebut keterangan-keterangan tambahan atas peranan sektor-sektor tersebut sangat diperlukan, antara lain data atau informasi dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) serta Skretaris Daerah Kabupaten Cilacap (SETDA). Dari data PDRB yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selama proses penelitian, selanjutnya peneliti menguraikan semua hasil yang telah diperoleh agar mendapatkan keunggulan kompetitif dari daerah Kabupaten Cilacap yang akan meningkatkan perekonomian daerah tersebut.

### 3.5 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan alat analisis *Shift-Share* (SS) merupakan alat analisis untuk menentukan kinerja sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Cilacap, serta menentukan sektor-sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif. Kemudian alat analisis kedua yaitu alat analisis *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) merupakan metode untuk memberikan nilai bobot setiap faktor dan variabel dalam menghitung faktor-faktor penentu daya saing ekonomi Kabupaten Cilacap.

#### 3.5.1 Alat Analisis *Shift-Share* (SS)

Analisis *Shift-Share* (SS) adalah salah satu teknik kuantitatif yang biasa digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah relatif terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih tinggi sebagai pembanding atau

referensi. Secara ringkas, Analisis Shift Share dapat dijelaskan bahwa perubahan suatu variabel regional suatu sektor di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dipengaruhi oleh pertumbuhan nasional, bauran industri, dan keunggulan kompetitif (Tarigan, 2004).

- 1) Pertama, pertumbuhan ekonomi referensi provinsi atau nasional (*national growth effect*), yang menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah terhadap perekonomian Kabupaten Cilacap.
- 2) Kedua, pergeseran proporsional (*proporsional shift*) yang menunjukkan perubahan relatif kinerja suatu sektor di Kabupaten Cilacap terhadap sektor yang sama di provinsi Jawa Tengah. Pergeseran proporsional (*proportional shift*) disebut juga pengaruh bauran industri (*industry mix*). Pengukuran ini memungkinkan peneliti untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada indutri-industri yang tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian yang dijadikan referensi.
- 3) *Ketiga*, pergeseran diferensial (*differential shift*) yang memberikan informasi dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah Kabupaten Cilacap dengan perekonomian Jawa Tengah. Jika pergeseran diferensial dari suatu industri adalah positif, maka industri tersebut relatif lebih tinggi daya saingnya dibandingkan industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan referensi. Pergeseran diferensial disebut juga pengaruh keunggulan kompetitif.

Formula yang digunakan untuk analisis *Shift-Share* ini adalah sebagai berikut :

- 1) Perubahan sektor i di Kabupaten Cilacap

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} \text{ atau } E_{ij}^* - E_{ij}$$

- 2) Pertumbuhan nasional sektor i di Kabupaten Cilacap

$$N_{ij} = E_{ij} \times r_n$$

- 3) Bauran industri sektor i di Kabupaten Cilacap

$$M_{ij} = E_{ij} (r_{in} - r_n)$$

- 4) Keunggulan kompetitif sektor i di Kabupaten Cilacap

$$C_{ij} = E_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

Keterangan :

$D_{ij}$  = perubahan sektor  $i$  di Kabupaten Cilacap

$N_{ij}$  = pertumbuhan nasional sektor  $i$  di Kabupaten Cilacap

$M_{ij}$  = bauran industri sektor  $i$  di Kabupaten Cilacap

$C_{ij}$  = keunggulan kompetitif di Kabupaten Cilacap

$E_{ij}$  = kesempatan kerja di sektor  $i$  daerah Kabupaten Cilacap

$E_{in}$  = kesempatan kerja di sektor  $i$  Jawa Tengah

$r_{ij}$  = laju pertumbuhan di sektor  $i$  daerah Kabupaten Cilacap

$r_{in}$  = laju pertumbuhan di sektor  $i$  Jawa Tengah

$r_n$  = laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah

### 3.5.2 Analytical Hierarchy Process (AHP)

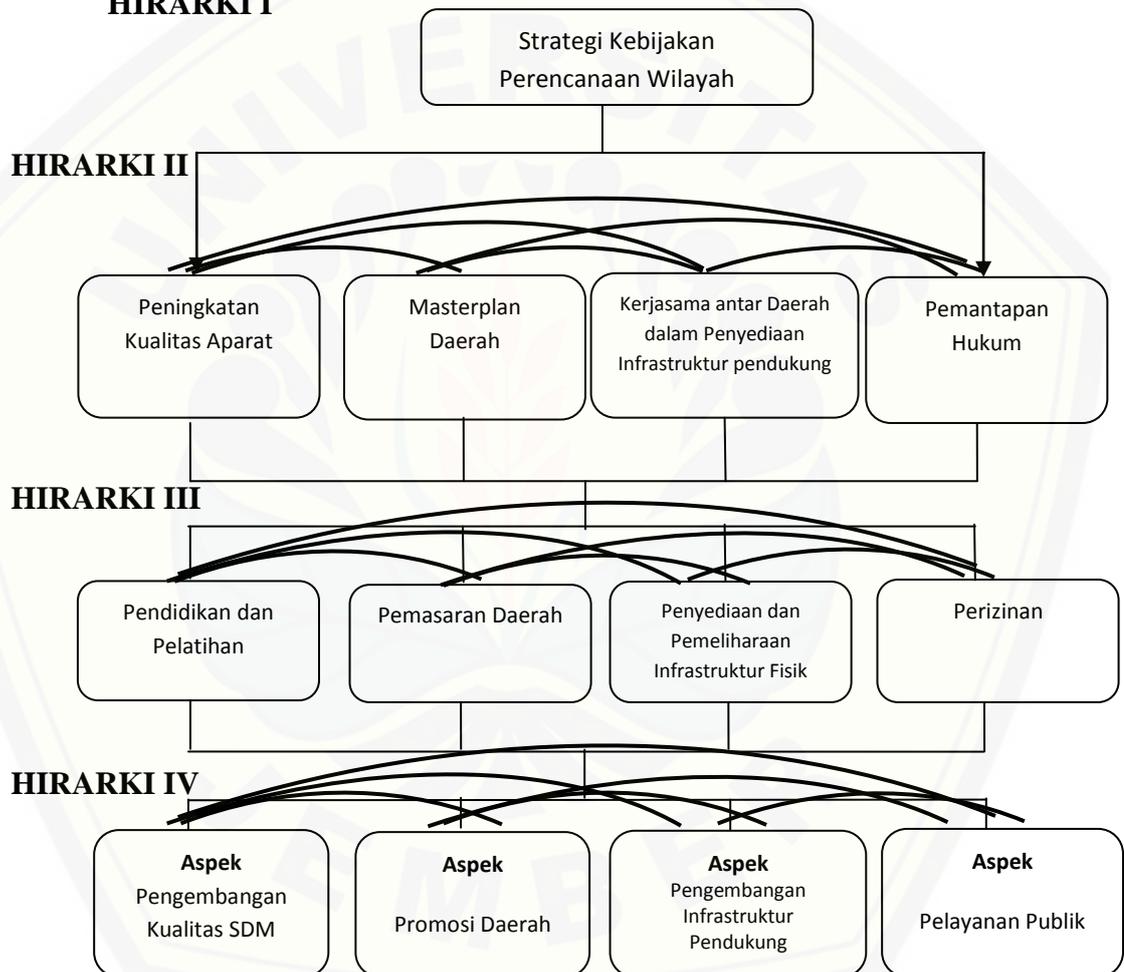
#### a. Pengertian *Analitycal Hierarchy Process* (AHP)

*Analitycal Hierarchy Process* (AHP) adalah metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen dalam susunan yang hirarki, dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif, dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut (Setiawan, 2015). Proses pengambilan keputusan pada dasarnya adalah memilih suatu alternatif yang terbaik. Seperti melakukan penstrukturan persoalan, penentuan alternatif-alternatif, penetapan nilai kemungkinan untuk variabel aleatori, penempat nilai, persyaratan preferensi terhadap waktu, dan spesifikasi atas resiko. Betapapun melebarnya alternatif yang dapat ditetapkan maupun terperinci penjajagan nilai kemungkinan, keterbatasan yang tetap melingkupi adalah dasar perbandingan berbentuk suatu kriteria yang tunggal.

Peralatan utama *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) adalah memiliki sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Dengan hirarki, suatu masalah kompleks dan tidak terstruktur dipecahkan ke dalam kelompok-kelompoknya dan diatur menjadi suatu bentuk hirarki. *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan metode yang lain karena alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, sampai pada sub kriteria yang paling dalam.
- 2) Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan.
- 3) Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan.

### HIRARKI I



Gambar 3.1 Hirarki Strategi Kebijakan Perencanaan Wilayah

Sumber : Lampiran E

Bentuk dan struktur dari hirarki dalam pembuatan prioritas kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Hirarki I adalah tujuan keputusan yang akan dicapai (Goal).

Dalam analisis ini yang menjadi tujuan keputusan yang akan dicapai dari penyusunan hirarki adalah strategi kebijakan perencanaan wilayah yang didasarkan pada kondisi dari perekonomian Kabupaten Cilacap.

- 2) Hirarki II adalah kriteria.

Yaitu kriteria apa saja yang harus dipenuhi dalam penyelesaian, agar layak untuk menjadi pilihan yang ideal. Pada hirarki II ini terdapat empat kriteria dalam mendukung strategi kebijakan perencanaan wilayah, yaitu :

- a) Peningkatan Kualitas Aparat

Kriteria ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan pembangunan manusia yang dimana Kabupaten Cilacap memiliki permasalahan pada sumber daya manusia setempat. Tujuan perencanaan pembangunan di Kabupaten Cilacap adalah untuk mencetak manusia yang berkualitas dan mampu meningkatkan perekonomian wilayah.

- b) Masterplan Daerah

Kriteria ini dimaksudkan untuk mengatasi berbagai macam potensi sumberdaya yang terdapat di Kabupaten Cilacap dengan penyesuaian lokasi. Sehingga pada setiap wilayah mampu menentukan sektor ekonomi mana yang akan di kembangkan.

- c) Kerjasama antar Daerah dalam Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pendukung

Kriteria ini dimaksudkan dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung sangat penting untuk melengkapi keterbatasan terhadap infrastruktur yang dimiliki suatu daerah, maka diperlukan lah suatu kerjasama dengan daerah lain.

d) Pemantapan Hukum

Kriteria ini dimaksudkan supaya suatu daerah agar menjaga keamanan daerah agar dapat mendukung suatu perekonomian daerah dan berdampak pada sebuah perencanaan daerah.

3) Hirarki III adalah subkriteria.

Subkriteria ini proses penyelesaian setelah kriteria, dimana pada kriteria tidak ditemukan titik pemecahan suatu masalah. Pada hirarki III ini terdapat empat kriteria dalam mendukung strategi kebijakan perencanaan wilayah, yaitu :

a) Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk pengembangan sumberdaya manusia, khususnya untuk pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian. Peran pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan bukan hanya menambah pengetahuan saja, tetapi juga meningkatkan ketrampilan bekerja yang akan meningkatkan produktivitas kerja.

b) Pemasaran Daerah

Pemasaran daerah diartikan sebagai suatu perencanaan dan perancangan suatu daerah agar mampu memenuhi harapan pasar targetnya. Pasar targetnya meliputi ; (1) penduduk dan masyarakat daerah tersebut, (2) turis, pengusaha, investor dari dalam dan luar daerah, dan (3) pengembang dan event organisers serta pihak-pihak lainnya.

c) Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Fisik

Dalam perekonomian sangat diperlukan dukungan oleh ketersediaan fasilitas atau infrastruktur fisik seperti jalan raya, pelabuhan laut dan sarana komunikasi (telpon) dan sumber energi atau penerangan.

d) Perizinan

Perizinan ini terkait dengan kebijakan daerah atau aturan main secara formal yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam mengatur aktifitas dunia usaha.

4) Hirarki IV adalah alternatif.

Yaitu proses terakhir dalam menentukan strategi kebijakan yang diambil oleh suatu daerah atau proses dalam pemeliharaan penyelesaian masalah. Pada hirarki IV ini terdapat empat kriteria dalam mendukung strategi kebijakan perencanaan wilayah, yaitu:

a) Aspek Pengembangan kualitas SDM

Aspek pengembangan kualitas SDM ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan sumberdaya manusia yang ada di daerah tersebut. karena semakin baik kualitas SDM daerah maka akan berpengaruh pada kualitas tenaga kerja, yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah.

b) Aspek Promosi Daerah

Dalam aspek promosi daerah ini memberikan gambaran terkait dengan upaya pemerintah dalam mengembangkan potensi daerah melalui seluruh sektor usaha. Cara dalam mempromosikan potensi tersebut baik pada tingkat lokal, nasional maupun manca negara, yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam upaya pengembangan pembangunan wilayah.

c) Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung

Dalam aspek pengembangan infrastruktur pendukung terkait dengan berbagai instalasi dan kemudahan dasar terutama pada sisten transportasi dan komunikasi yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian dari suatu daerah ke daerah lain.

d) Aspek Pelayanan Publik

Aspek pelayanan publik ini merupakan pelaksanaan suatu fungsi administrasi pemerintah dalam menyediakan pelayanan terhadap masyarakat.

Penyusunan hirarki diatas dimaksudkan untuk membantu proses dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan, khususnya pada peetapan strategi perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Cilacap. Proses AHP ini lah yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan Kabupaten Cilacap dengan membandingkan tingkat prioritas beberapa variabel pada suatu level dari suatu susunan hirarki berdasarkan penilaian dari beberapa responden yang dianggap ekspert pada bidangnya. Untuk responden menggunakan lebih dari satu

responden, supaya dalam proses pengambilan keputusan dapat dirumuskan dari berbagai sudut pandang terkait dengan proses pemilihan strategi yang akan menghasilkan suatu kebijakan publik yang berdampak pada beberapa pihak (Mustada, 2012).

Untuk mencari strategi kebijakan tersebut, penulis menghubungi 2 instansi dan 16 orang yang terdiri dari para stakeholder antara lain :

1) Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap (Setda)

Instansi ini dijadikan tempat penelitian dengan pertimbangan untuk menentukan strategi kebijakan yang akan diambil, karena dianggap mampu dan mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi Kabupaten Cilacap terkait dengan pembangunan wilayah Kabupaten Cilacap. Dipilih 8 responden yang mampu memberikan informasi dan kontribusi pemikiran terhadap pengambilan suatu kebijakan.

2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)

Instansi ini dijadikan sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan bahwa bappelitbangda lembaga yang terkait dengan koordinasi berbagai macam lintas sektoral, sehingga dianggap relevan untuk memberikan berbagai macam analisis dengan strategi kebijakan yang akan dirapkan di Kabupaten Cilacap. Dipilih 8 responden yang mampu memberikan informasi dan kontribusi pemikiran terhadap pengambilan suatu kebijakan.

Dalam pembuatan kuesioner memang dibuat sesederhana mungkin, sehingga mampu dipahami oleh responden dan dapat memberikan penilaian terhadap beberapa variabel yang diperbandingkan dengan benar tanpa ada keraguan. Tujuannya untuk merumuskan berbagai prioritas kebijakan dalam rangka perencanaan pembangunan wilayah.

Hasil penilaian atau perbandingan responden dari beberapa aspek tersebut kemudian diolah secara manual dengan menggunakan sebuah matriks. Diperolehlah sebuah pembobotan prioritas yang menunjukkan hasil akhir dari beberapa aspek yang menjadi kebijakan prioritas. Bobot prioritas responden secara rata-rata ukur terdapat pada lampiran M pada halaman lampiran.

Langkah selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan mentabulasikan hasil wawancara penelitian dalam bentuk tabel untuk kemudian dihitung nilai geomeannya, yaitu nilai sentral yang dianggap mewakili nilai seluruh data yang diperoleh dari nilai kualifikasi persepsi dikalikan satu dengan lainnya dan dicari pangkat dari jumlah responden.

Rumus geomean tersebut adalah :

$$\sqrt[n]{X_1, X_2, X_3, \dots, X_n}$$

Dari hasil tersebut selanjutnya membentuk matriks *pair-wise comparasion* yang membandingkan antara berbagai faktor dalam menentukan strategi dan kebijakan wilayah dengan menggunakan prinsip kebalikan dan kemudian diisi dengan angka geomean yang diperoleh dari tabulasi. Selanjutnya, menghitung rasio tiap elemen terhadap nilai total elemen pada matriks *pair-wise* dan dipindahkan untuk diubah menjadi *matrix priority vector*.

Cara menentukan susunan prioritas elemen pada AHP dilakukan dengan menyusun perbandingan berpasangan yaitu membandingkan dalam bentuk berpasangan seluruh elemen untuk setiap hirarki.

Tabel 3.1 Formula Matriks *Pair-Wise Comparison*

Kriteria/ Alternatif	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	.....	A <sub>n</sub>
A <sub>1</sub>	a <sub>11</sub>	a <sub>12</sub>	.....	a <sub>1n</sub>
A <sub>2</sub>	a <sub>21</sub>	a <sub>22</sub>	.....	a <sub>2n</sub>
.....	.....	.....	.....	.....
A <sub>n</sub>	a <sub>m1</sub>	a <sub>m1</sub>	.....	A <sub>mn</sub>

Sumber: Bambang Permadi S, 1992

Nilai a<sub>11</sub> adalah nilai perbandingan elemen A<sub>1</sub> (baris) terhadap A<sub>1</sub> (kolom) yang menyatakan hubungan :

- a) Seberapa jauh tingkat kepentingan A<sub>1</sub> (baris) terhadap kriteria C dibandingkan dengan A<sub>1</sub> (kolom) atau
- b) Seberapa jauh dominasi A<sub>1</sub> (baris) terhadap A<sub>1</sub> (kolom) atau

- c) Seberapa banyak sifat kriteria C terdapat pada  $A_1$  (baris) dibandingkan dengan  $A_1$  (kolom).

Nilai numerik yang dikenakan untuk seluruh perbandingan tersebut diperoleh dari skala perbandingan 1 sampai 9.

Tabel 3.2 Skala perbandingan Saaty

Intensitas Pentingnya	Definisi	Penjelasan
1	Sama penting	Kedua elemen mempunyai pengaruh yang sama
3	Sedikit lebih penting	Pengalaman dan penilaian sangat memihak satu elemen dibandingkan dengan pasangannya
5	Agak lebih penting	Satu elemen sangat disukai dan secara praktis dominasinya sangat nyata, dibandingkan dengan pasangannya
7	Jauh lebih penting	Satu elemen terbukti sangat disukai dan secara praktis dominasinya sangat, dibandingkan dengan pasangannya
9	Mutlak lebih penting	Satu elemen mutlak lebih disukai dibandingkan dengan pasangannya, pada tingkat keyakinan tertinggi
2,4,6,8	Nilai antara angka diatas	Nilai diantara dua pilihan yang berdekatan
Resiprokal	Jika $A/B=9$ maka $B/A=1/9$	Jika elemen $i$ memiliki salah satu angka diatas ketika dibandingkan elemen $j$ , maka $j$ memiliki kebalikannya ketika dibanding elemen $i$

Sumber : Thomas L Saaty 1980

#### b. Uji Konsistensi Indeks dan Rasio

AHP mentoleransi tingkat konsistensi sebesar kurang dari 10% dan apabila lebih dari 10% maka responden dianggap tidak konsisten dalam menjawab pertanyaan dan diperbolehkan melakukan perbaikan atas penilaian yang diberikan. Konsistensi dalam hal ini diartikan sebagai intensitas hubungan antar elemen yang didasarkan pada kriteria tertentu, saling membenarkan secara logis. Pengujian konsistensi dilakukan sebagai cara untuk melihat konsistensi jawaban penilaian

pasangan terhadap perbandingan maupun struktur hirarki permasalahan. Adapun formulasi untuk menghitung indeks konsistensi adalah sebagai berikut :

*Consistenc Index (CI) :*

$$CI = \frac{(\lambda - n)}{(n - 1)}$$

Dimana :     n : jumlah kriteria, bukan responden  
              λ : rata-rata dari konsistensi vector

Apabila CI bernilai nol, maka pair wise comparison matrix tersebut konsisten.

Batas ketidakkonsistenan yang telah diciptakan oleh Thomas L. Saaty ditentukan dengan menggunakan Rasio Konsistensi (CR), yaitu perbandingan indeks konsistensi dengan nilai random indeks (RI) yang di dapatkan dari suatu eksperimen oleh Ridge National Laboratory kemudian dikembangkan oleh Wharton School. Dengan demikian, rasio konsistensi dapat dirumuskan sebagai berikut :

*Consistency Ratio (CR) :*

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Dimana :     RI = Random Indeks

Tabel 3.3 Nilai Random Indeks (RI)

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RI	0,000	0,000	0,580	0,900	1,120	1,240	1,320	1,410	1,450	1,490	1,510	1,480	1,560	1,570	1,590

Sumber : Thomas L. Saaty 1980

Bila matriks pair-wise compaision dengan nilai CR lebih kecil dari 0,100 maka ketidak konsistenan pendapat dari *deccesion maker* masih dapat diterima dan jika tidak maka penilaian perlu diulang.

Langkah terakhir adalah menghitung rasio konsistensi, dengan terlebih dahulu menghitung *weighted sum vector* yang diperoleh dari penjumlahan antara perkalian nilai rata-rata pada matriks *priority vector* dengan nilai elemen dalam *matrix priority vector* sehingga akan diperoleh konsistensi vector.

c. Kelebihan dan Kelemahan *Analitycal Hierarchy Process* (AHP)

Layaknya sebuah metode analisis, *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) memiliki kelebihan dan kelemahan dalam sistem analisisnya. Kelebihan-kelebihan analisis ini adalah :

1) Kesatuan (*Unity*)

*Analitycal Hierarchy Process* (AHP) membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami.

2) Kompleksitas (*Complexity*)

*Analitycal Hierarchy Process* (AHP) memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara deduktif.

3) Saling ketergantungan (*Inter Dependence*)

*Analitycal Hierarchy Process* (AHP) dapat digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan linier.

4) Struktur Hirarki (*Hierarchy Structuring*)

*Analitycal Hierarchy Process* (AHP) mewakili pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan elemen sistem ke level-level yang berbeda dari masing-masing level berisi elemen yang serupa.

5) Pengukuran (*Measurement*)

*Analitycal Hierarchy Process* (AHP) menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan prioritas.

6) Konsistensi (*Consistency*)

*Analitycal Hierarchy Process* (AHP) mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas.

7) Sintesis (*Synthesis*)

*Analitycal Hierarchy Process* (AHP) mengarah pada perkiraan keseluruhan mengenai seberapa diinginkannya masing-masing alternatif.

8) *Trade Off*

*Analitycal Hierarchy Process* (AHP) mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada sistem sehingga orang mampu memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan mereka.

9) Penilaian dan Konsensus (*Judgement and Consensus*)

*Analitycal Hierarchy Process* (AHP) tidak mengharuskan adanya suatu konsensus, tapi menggabungkan hasil penilaian yang berbeda.

10) Pengulangan Proses (*Process Repetition*)

*Analitycal Hierarchy Process* (AHP) mampu membuat orang menyaring definisi dari suatu permasalahan dan mengembangkan penilaian serta pengertian mereka melalui proses pengulangan.

Sedangkan kelemahan metode *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) adalah sebagai berikut:

- 1) Ketergantungan model *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang ahli sehingga dalam hal ini melibatkan subyektifitas sang ahli selain itu juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru.
- 2) Metode *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk.
- 3) Prinsip Menyusun Hirarki  
Prinsip menyusun hirarki adalah dengan menggambarkan dan menguraikan secara hirarki, dengan cara memecahkan persoalan menjadi unsur-unsur yang terpisah-pisah. Caranya dengan memperincikan pengetahuan, pikiran kita yang kompleks ke dalam bagian elemen pokoknya, lalu bagian ini ke dalam bagian-bagiannya, dan seterusnya secara hirarkis.
- 4) Penjabaran tujuan hirarki yang lebih rendah pada dasarnya ditujukan agar memperoleh kriteria yang dapat diukur. Walaupun sebenarnya tidaklah selalu demikian keadaannya. Dalam beberapa hal tertentu, mungkin lebih menguntungkan bila menggunakan tujuan pada hirarki yang lebih tinggi dalam proses analisis. Semakin rendah dalam menjabarkan suatu tujuan, semakin mudah pula penentuan ukuran obyektif dan kriteria-kriterianya. Akan tetapi, ada kalanya dalam proses analisis pengambilan keputusan tidak memerlukan penjabaran yang terlalu terperinci. Maka salah satu cara

untuk menyatakan ukuran pencapaiannya adalah menggunakan skala subyektif.

### 3.5 Definisi Operasional

#### 1. PDRB

PDRB adalah jumlah nilai tambah kontribusi 17 sektor ekonomi yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di seluruh daerah dalam periode satu tahun. Penelitian ini menggunakan PDRB atas dasar harga konstan, yaitu harga yang dianggap tidak berubah, serta menggunakan PDRB tahun dasar 2010 sebagai dasar perhitungannya.

#### 2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat dimana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Kebijakan publik inilah yang nantinya digunakan dalam pencapaian perencanaan suatu daerah.

#### 3. Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif yaitu bagaimana suatu daerah menggunakan segala sumberdaya baik alam maupun manusia yang dimiliki untuk bersaing dengan daerah lain.

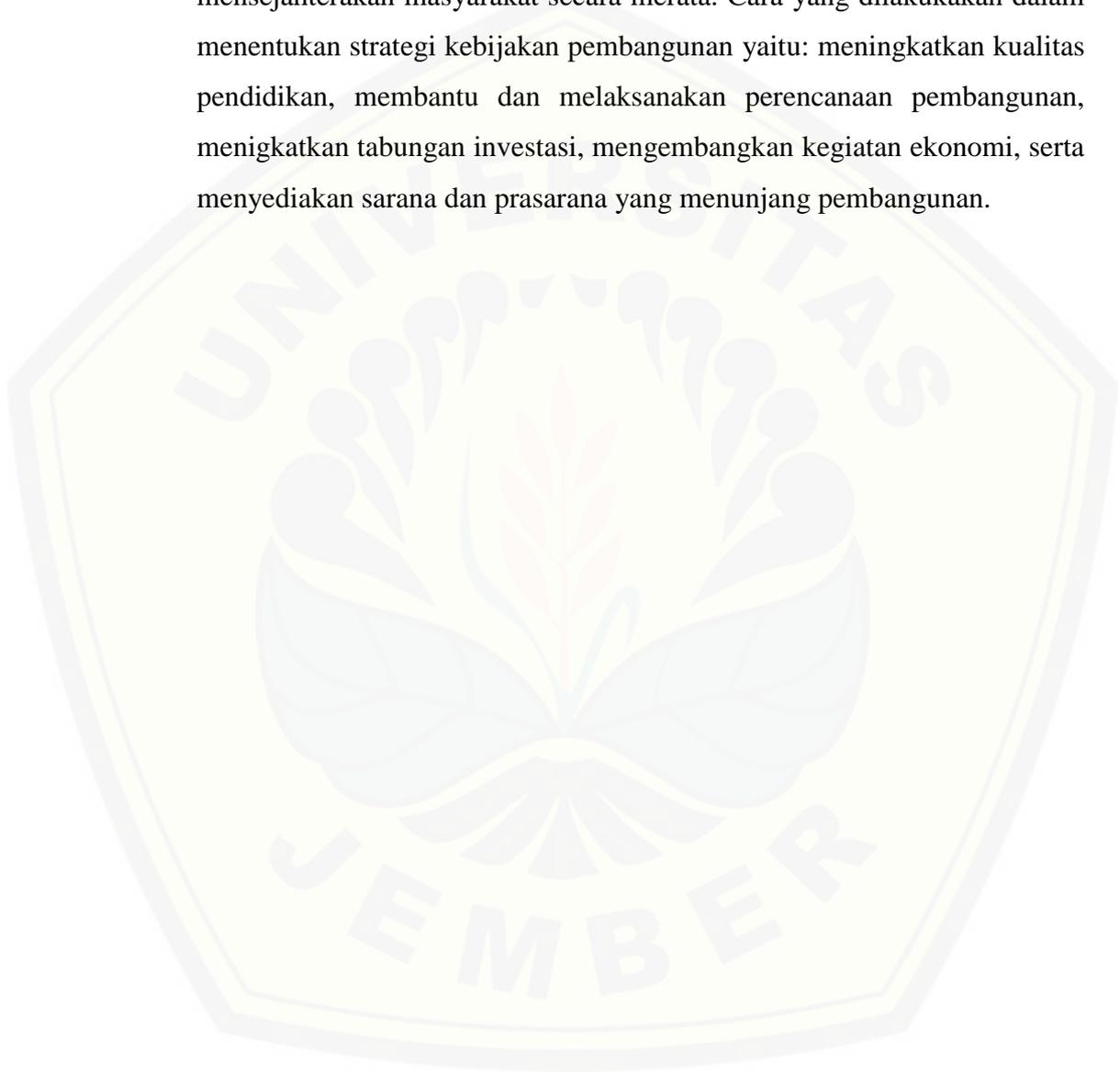
#### 4. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses-peroses yang penting dari semua fungsi manajemen sebab tanpa perencanaan (planning) fungsi pengorganisasian, pengontrolan maupun pengarahan tidak akan dapat berjalan. Penelitian ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJPD ini merupakan proses pengkajian kondisi sektor ekonomi unggulan dalam rangka mendapatkan peta potensi ekonomi daerah, sedangkan RPJMD

merupakan proses identifikasi dan analisis permasalahan-permasalahan aktual pembangunan untuk periode 5 tahun ke depan.

5. Strategi Kebijakan Pembangunan

Strategi kebijakan pembangunan dilakukan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara merata. Cara yang dilakukan dalam menentukan strategi kebijakan pembangunan yaitu: meningkatkan kualitas pendidikan, membantu dan melaksanakan perencanaan pembangunan, meningkatkan tabungan investasi, mengembangkan kegiatan ekonomi, serta menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang pembangunan.



## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisa metode analisis *Shift-Share* bahwa Kabupaten Cilacap selama kurun waktu tahun 2011-2015 terdapat sektor yang memiliki keunggulan kompetitif yang ditandai dengan menunjukkan angka positif pada hasil perbandingan terhadap pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah. Keunggulan kompetitif yang terdapat pada sektor ekonomi di Kabupaten Cilacap ada 11 sektor keunggulan kompetitif yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor industri pengolahan; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor real estate; sektor jasa perusahaan; sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; sektor jasa lainnya. dari sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif ini maka harus dibuat kebijakan yang dapat mendorong sektor ini agar mampu berdaya saing terhadap daerah lain.
2. Berdasarkan hasil analisa metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) diperoleh pemecahan dalam strategi kebijakan perencanaan Kabupaten Cilacap dengan menggunakan bobot prioritas yang diambil melalui hirarki IV yaitu pada aspek pengembangan kualitas SDM. Sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada Kabupaten Cilacap yang kurang mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki baik manusia maupun alamnya. Kemudian diikuti dengan pendidikan dan pelatihan yang memiliki bobot paling tinggi pada hirarki III, setelah itu diikuti dengan peningkatan kualitas aparat yang memiliki bobot tertinggi pada hirarki II. Dari hasil strategi kebijakan pembangunan yang dihasilkan maka akan

membantu proses perencanaan pembangunan Kabupaten Cilacap, dengan prioritas kebijakan pengembangan kualitas SDM. Kebijakan strategi pengembangan kualitas SDM didukung dengan kebijakan peningkatan kualitas aparat dan kebijakan pendidikan dan pelatihan. Kebijakan peningkatan kualitas aparat diterapkan pada sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Sedangkan kebijakan pendidikan diterapkan pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor industri pengolahan; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor real estate; sektor jasa perusahaan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; sektor jasa lainnya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dilakukan maka dapat ditarik saran sebagai berikut :

1. Pemerintah harus lebih mengoptimalkan sektor-sektor ekonomi yang memiliki daya saing seperti:
  - a. Melalui pendidikan dan pelatihan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dioptimalkan agar dapat meningkatkan hasil produksi. Di sektor industri pengolahan melalui pendidikan dan pelatihan agar SDM memiliki kemampuan dalam mengelola industri-industri di daerah tersebut. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor agar masyarakatnya mempunyai kemampuan dalam meningkatkan hasil usahanya. Sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor real estate; sektor jasa perusahaan; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; sektor jasa lainnya, agar mencetak masyarakat yang expert pada masing-masing bidang yang telah dipelajari.
  - b. Sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan

jaminan sosial wajib dioptimalkan dengan memperbaiki birokrasi untuk menciptakan pelayanan publik yang efektif dan efisien, serta meningkatkan pelayanan publik untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Cilacap.

2. Menyusun strategi kebijakan pengemabangan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas aparat serta pendidikan dan pelatihan. Peningkatan kualitas aparat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembangunan manusia dalam pengembangan kualitas SDM dengan tujuan untuk mencetak SDM yang berkualitas. Sedangkan melalui pendidikan dan pelatihan dilakukan dalam upaya mengembangkan kemampuan intelektual serta untuk meningkatkan ketrampilan tanaga kerja yang akan meningkatkan produktivitas kerja. Dengan kualitas SDM yang baik maka diharapkan mampu mendukung sumberdaya yang memiliki keunggulan kompetitif yang mampu berdaya saing dengan daerah lain, melalui SDM yang berkualitas maka diharapkan mampu meningkatkan penawaran tenaga kerja Kabupaten Cilacap. Dengan strategi kebijakan pengembangan kualitas SDM memiliki tujuan dalam perbaikan dan peningkatan kualitas SDM agar menciptakan tenaga kerja yang berkualitas yang mampu membawa pada perencanaan pembangunan Kabupaten Cilacap secara strategis dalam peningkatan perekonomian daerah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ardisasmita, Rahardjo. 2005. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arsyad, Lincoln. 1997. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah (Isted)*. Yogyakarta: BPFPE.
- . 2000. *Ekonomi Manajerial. Ekonomi Mikro Terapan untuk Manajemen Bisnis Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UGM.
- . 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi 5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Atama, Samuel Johanis. 2016. *Analisis Potensi Ekonomi Lokal Untuk Pengembangan Dan Penguatan Daya Saing Daerah Di Kabupaten Alor Tahun 2009-2013*. Jurnal. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap. 201. *Cilacap Dalam Angka 2014*. Cilacap: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap.
- Badan Pusat Statistik: 2014. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cilacap*. Jawa Tengah: BPS.
- . 2015. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cilacap*. Jawa Tengah: BPS.
- . 2016. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cilacap*. Jawa Tengah: BPS.
- Bank Indonesia, PPSK (2008). *Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*: Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Damiana, S., dan Sirojuzilam. 2013. *Potensi Wilayah Dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kabupaten Toba Samosir*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*.
- Dunn, William, N. 1994. *Public Polcy analysis*, New Jersey : Prentice Hall, Inc.
- Endi, R., W. Suparta, dan Husnaini. 2015. *Analisis Sektor Unggulan dan Pengembangan Wilayah di Kota Bandar Lampung 2000-2012*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Fianstein and Norman. 1991. *City Planning and Political Value*. *Journal Urban Affairs Quarterly*. Vol. 2. No.3.

- Halwani, R Hendra. 2002. *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hartinah. 2016. Angka Kemiskinan Cilacap masih Tinggi. *Oresi Ilmiah*. Cilacap: Forum Pertemuan dengan komisi B PDRB Jawa Tengah. 23 Maret.
- Jhingan. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencana, Penerjemah Guritno*. Penerbit PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Mustopadidjaya. 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: LAN.
- Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2014. *Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal*. 23 April 2014. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Permadi S, Bambang. 1992. *Analytical Hirarchy Process*. Jakarta : PAU-EK-UI.
- Piranti, P. dan I. G. S. Nasution. 2015. Analisis Daya Saing Ekonomi Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*.
- Porter, Michael E. 2002. *Keunggulan Bersaing*. Alih Bahasa Agung Dharma. Erlangga. Jakarta.
- Riyadi, dan Bratakusumah, Deddy Supriady. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Saaty Thomas L. 1980. *The Analytical Hierarchy Process*. New York : Mc Graw-Hill.
- Setiawan, Herdi. 2015. Metode dan Cara Perhitungan AHP. <https://herdiset.wordpress.com/2015/01/16/metode-ahp-dan-cara-perhitungan-ahp>. [Diakses pada 20 Januari 2017].
- Sirojuzilam dan Mahali, K. 2010. *Pembangunan, Perencanaan dan Ekonomi*. Medan: USU Press.
- Solihin. D. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan dan Proses*. Diklat perencanaan Pembangunan Ekonomi.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kajian Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Supriana, Tavi. 2008. *Ekonomi Makro*. USU Pres. Medan.

Suryana. 2002. *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat.

Sutikno dan Maryani. 2007. Analisis Potensi Daya Saing Kecamatan Sebagai Pusat Pertumbuhan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Kabupaten Malang. *Journal of Indonesian Applied Economics*.

Tarigan, S. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Bumi Aksara.

Tambunan, Tulus. 2002. *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.



# LAMPIRAN

## Lampiran A

## PDRB Provinsi Jawa Tengah ADHK Tahun 2010-2015

No	Sektor	PDRB Jawa Tengah					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	99.572.441,08	103.389.332,91	106.536.703,12	108.832.110,55	107.793.380,89	113.826.299,04
2	Pertambangan dan Penggalian	13.346.392,63	13.054.134,23	13.745.874,30	14.594.164,05	15.566.648,84	16.040.765,67
3	Industri Pengolahan	215.156.474,55	226.325.616,81	241.528.855,93	254.694.118,95	271.526.773,18	284.575.766,45
4	Pengadaan Listrik dan Gas	636.381,90	683.057,13	751.160,19	813.604,61	866.488,30	887.584,37
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	543.235,90	555.544,34	547.794,91	549.040,44	567.980,08	577.261,68
6	Konstruksi	64.423.248,23	65.862.379,63	70.034.622,63	73.465.919,37	76.681.876,60	81.286.113,22
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	91.678.669,23	99.227.580,89	101.058.608,68	105.825.306,31	110.899.193,58	115.299.085,85
8	Transportasi dan Pergudangan	18.644.272,73	19.522.426,60	20.818.468,63	22.760.150,97	24.868.280,75	26.807.881,97
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	18.772.500,06	19.818.724,00	20.871.604,64	21.812.570,05	23.471.641,07	25.064.275,14
10	Informasi dan Komunikasi	20.826.935,54	22.498.427,37	24.690.219,27	26.663.583,07	30.130.161,63	33.001.271,38
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	17.234.332,49	17.947.552,74	18.588.738,12	19.311.454,80	20.106.851,64	21.719.194,85
12	Real Estate	10.670.140,43	11.319.281,24	11.934.423,12	12.853.218,11	13.776.863,54	14.822.295,08
13	Jasa Perusahaan	1.782.800,10	1.949.153,80	2.087.130,46	2.340.118,40	2.526.615,62	2.741.142,86
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	19.764.882,09	20.272.588,25	20.373.579,95	20.912.828,39	21.075.646,54	22.194.694,80
15	Jasa Pendidikan	16.352.073,04	19.361.911,07	22.760.883,69	24.930.587,32	27.266.220,07	29.324.081,90
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.096.105,88	4.495.091,17	4.959.375,94	5.312.609,80	5.916.710,61	6.307.617,26
17	Jasa Lainnya	9.723.735,44	9.985.327,72	10.055.072,38	10.983.732,87	11.917.818,01	12.300.030,67
PDRB		623.224.621,33	656.268.129,91	691.343.115,96	726.655.118,06	764.959.150,95	806.775.362,19

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

## Lampiran B

## PDRB Kabupaten Cilacap ADHK Tahun 2010-2015

No	Sektor	PDRB Kabupaten Cilacap					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.612.505,73	5.712.491,03	6.003.870,63	6.206.301,40	6.158.626,10	6.446.712,60
2	Pertambangan dan Penggalian	2.187.252,84	1.629.845,88	1.743.558,00	1.863.796,74	2.038.906,00	2.145.647,80
3	Industri Pengolahan	9.297.874,57	10.511.326,83	11.057.266,20	12.157.842,13	12.427.275,60	13.031.030,50
4	Pengadaan Listrik dan Gas	32.524,09	35.523,26	39.527,01	43.457,42	45.980,00	44.348,00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	29.882,69	30.974,26	29.852,70	29.273,10	31.270,40	31.300,90
6	Konstruksi	3.231.692,46	3.331.860,69	3.474.561,94	3.549.951,53	3.680.933,10	3.997.282,70
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.331.422,39	3.720.120,20	3.740.892,54	3.775.682,41	4.068.354,50	4.297.309,20
8	Transportasi dan Pergudangan	1.450.981,91	1.523.886,04	1.649.787,88	1.864.673,55	2.024.163,50	2.117.324,10
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	596.575,38	647.396,48	684.932,11	713.634,86	787.181,30	834.767,30
10	Informasi dan Komunikasi	827.295,48	913.530,08	1.004.837,34	1.058.971,95	1.253.535,00	1.316.984,60
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	508.524,25	550.436,61	559.132,93	571.527,44	615.958,40	662.598,30
12	Real Estate	480.601,24	528.215,34	563.714,15	610.020,69	670.423,80	720.538,80
13	Jasa Perusahaan	72.779,74	81.102,54	86.795,39	99.055,61	109.128,30	119.733,90
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	800.851,99	830.032,34	830.149,36	851.071,49	860.731,90	913.791,10
15	Jasa Pendidikan	703.305,37	848.712,59	962.194,35	1.050.630,10	1.116.730,20	1.189.706,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	155.876,22	177.771,30	193.011,36	209.901,71	240.651,90	262.244,90
17	Jasa Lainnya	450.910,35	464.700,61	474.183,09	525.882,53	565.538,30	588.446,50
	<b>PDRB</b>	<b>29.770.856,70</b>	<b>31.537.926,09</b>	<b>33.098.266,99</b>	<b>35.181.674,63</b>	<b>36.695.388,20</b>	<b>38.719.767,50</b>

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap

## Lampiran C

## Perhitungan Shift-Share Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2015

2010-2011

SEKTOR	SHIFT SHARE													
	PDRB Cilacap	PDRB Cilacap	PDRB Jateng	PDRB Jateng	Nij	Mij	Eij 2010	Cij = Eij(rij-rin)						Dij
	2010	2011	2010	2011	2011	2011	2011	Rij	rin	rn	rin-rn	rij-rin	Cij	
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.612.505,73	5.712.491,03	99.572.441,08	103.389.332,91	297576,31	-82433,17	5.612.505,73	0,018	0,038	0,05	-0,015	-0,0205	-115157,84	99985,30
Pertambangan dan Penggalian	2.187.252,84	1.629.845,88	13.346.392,63	13.054.134,23	115968,63	-163864,95	2.187.252,84	-0,255	-0,022	0,05	-0,075	-0,2329	-509510,65	-557406,96
Industri Pengolahan	9.297.874,57	10.511.326,83	215.156.474,55	226.325.616,81	492975,39	-10306,74	9.297.874,57	0,131	0,052	0,05	-0,001	0,0786	730783,62	1213452,26
Pengadaan Listrik dan Gas	32.524,09	35.523,26	636.381,90	683.057,13	1724,43	661,03	32.524,09	0,092	0,073	0,05	0,020	0,0189	613,70	2999,17
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	29.882,69	30.974,26	543.235,90	555.544,34	1584,39	-907,32	29.882,69	0,037	0,023	0,05	-0,030	0,0139	414,50	1091,57
Konstruksi	3.231.692,46	3.331.860,69	64.423.248,23	65.862.379,63	171345,06	-99153,26	3.231.692,46	0,031	0,022	0,05	-0,031	0,0087	27976,43	100168,23
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.331.422,39	3.720.120,20	91.678.669,23	99.227.580,89	176632,76	97679,83	3.331.422,39	0,117	0,082	0,05	0,029	0,0343	114385,22	388697,81
Transportasi dan Pergudangan	1.450.981,91	1.523.886,04	18.644.272,73	19.522.426,60	76931,38	-8589,47	1.450.981,91	0,050	0,047	0,05	-0,006	0,0031	4562,21	72904,13
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	596.575,38	647.396,48	18.772.500,06	19.818.724,00	31630,56	1617,62	596.575,38	0,085	0,056	0,05	0,003	0,0295	17572,92	50821,10
Informasi dan Komunikasi	827.295,48	913.530,08	20.826.935,54	22.498.427,37	43863,39	22532,25	827.295,48	0,104	0,080	0,05	0,027	0,0240	19838,96	86234,60
Jasa Keuangan dan Asuransi	508.524,25	550.436,61	17.234.332,49	17.947.552,74	26962,07	-5917,46	508.524,25	0,082	0,041	0,05	-0,012	0,0410	20867,75	41912,36
Real Estate	480.601,24	528.215,34	10.670.140,43	11.319.281,24	25481,59	3756,82	480.601,24	0,099	0,061	0,05	0,008	0,0382	18375,70	47614,10
Jasa Perusahaan	72.779,74	81.102,54	1.782.800,10	1.949.153,80	3858,80	2932,30	72.779,74	0,114	0,093	0,05	0,040	0,0210	1531,70	8322,80
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	800.851,99	830.032,34	19.764.882,09	20.272.588,25	42461,35	-21889,64	800.851,99	0,036	0,026	0,05	-0,027	0,0107	8608,64	29180,35
Jasa Pendidikan	703.305,37	848.712,59	16.352.073,04	19.361.911,07	37289,41	92164,22	703.305,37	0,207	0,184	0,05	0,131	0,0227	15953,59	145407,22
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	155.876,22	177.771,30	4.096.105,88	4.495.091,17	8264,59	6918,69	155.876,22	0,140	0,097	0,05	0,044	0,0431	6711,80	21895,08
Jasa Lainnya	450.910,35	464.700,61	9.723.735,44	9.985.327,72	23907,37	-11776,78	450.910,35	0,031	0,027	0,05	-0,026	0,0037	1659,67	13790,26
PDRB	29.770.856,70	31.537.926,08	623.224.621,32	656.268.129,90	1.578.457,47	-176.576,01	29.770.856,70	1,12	0,98	0,90	0,08	0,14	365.187,92	1.767.069,38

2011-2012

SEKTOR	SHIFT SHARE													
	PDRB Cilacap	PDRB Cilacap	PDRB Jateng	PDRB Jateng	Nij	Mij	Eij 2011	Cij = Eij(rij-rin)						Dij
	2011	2012	2011	2012	2012	2012		Rij	rin	rn	rin-rn	rij-rin	Cij	
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.712.491,03	6.003.870,63	103.389.332,91	106.536.703,12	302877,55	-128978,33	5.712.491,03	0,051	0,030	0,05	-0,023	0,0206	117480,38	291379,60
Pertambangan dan Penggalian	1.629.845,88	1.743.558,00	13.054.134,23	13.745.874,30	86414,79	-49,07	1.629.845,88	0,070	0,053	0,05	0,000	0,0168	27346,40	113712,12
Industri Pengolahan	10.511.326,83	11.057.266,20	226.325.616,81	241.528.855,93	557312,90	148776,93	10.511.326,83	0,052	0,067	0,05	0,014	-0,0152	-160150,46	545939,37
Pengadaan Listrik dan Gas	35.523,26	39.527,01	683.057,13	751.160,19	1883,45	1658,34	35.523,26	0,113	0,100	0,05	0,047	0,0130	461,96	4003,75
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	30.974,26	29.852,70	555.544,34	547.794,91	1642,26	-2074,33	30.974,26	-0,036	-0,014	0,05	-0,067	-0,0223	-689,49	-1121,56
Konstruksi	3.331.860,69	3.474.561,94	65.862.379,63	70.034.622,63	176656,00	34410,36	3.331.860,69	0,043	0,063	0,05	0,010	-0,0205	-68365,11	142701,25
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.720.120,20	3.740.892,54	99.227.580,89	101.058.608,68	197241,60	-128594,93	3.720.120,20	0,006	0,018	0,05	-0,035	-0,0129	-47874,33	20772,34
Transportasi dan Pergudangan	1.523.886,04	1.649.787,88	19.522.426,60	20.818.468,63	80796,78	20369,97	1.523.886,04	0,083	0,066	0,05	0,013	0,0162	24735,09	125901,84
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	647.396,48	684.932,11	19.818.724,00	20.871.604,64	34325,11	68,19	647.396,48	0,058	0,053	0,05	0,000	0,0049	3142,34	37535,63
Informasi dan Komunikasi	913.530,08	1.004.837,34	22.498.427,37	24.690.219,27	48435,57	40560,33	913.530,08	0,100	0,097	0,05	0,044	0,0025	2311,36	91307,26
Jasa Keuangan dan Asuransi	550.436,61	559.132,93	17.947.552,74	18.588.738,12	29184,27	-9519,65	550.436,61	0,016	0,036	0,05	-0,017	-0,0199	-10968,31	8696,32
Real Estate	528.215,34	563.714,15	11.319.281,24	11.934.423,12	28006,10	699,56	528.215,34	0,067	0,054	0,05	0,001	0,0129	6793,16	35498,81
Jasa Perusahaan	81.102,54	86.795,39	1.949.153,80	2.087.130,46	4300,07	1441,01	81.102,54	0,070	0,071	0,05	0,018	-0,0006	-48,23	5692,85
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	830.032,34	830.149,36	20.272.588,25	20.373.579,95	44008,50	-39873,54	830.032,34	0,000	0,005	0,05	-0,048	-0,0048	-4017,94	117,02
Jasa Pendidikan	848.712,59	962.194,35	19.361.911,07	22.760.883,69	44998,93	103992,09	848.712,59	0,134	0,176	0,05	0,123	-0,0418	-35509,26	113481,76
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	177.771,30	193.011,36	4.495.091,17	4.959.375,94	9425,47	8936,00	177.771,30	0,086	0,103	0,05	0,050	-0,0176	-3121,42	15240,06
Jasa Lainnya	464.700,61	474.183,09	9.985.327,72	10.055.072,38	24638,53	-21392,73	464.700,61	0,020	0,007	0,05	-0,046	0,0134	6236,68	9482,48
PDRB	31.537.926,08	33.098.266,98	656.268.129,90	691.343.115,96	1.672.147,88	30.430,19	31.537.926,08	0,93	0,99	0,90	0,09	-0,06	-142.237,18	1.560.340,90

2012-2013

SEKTOR	SHIFT SHARE													
	PDRB Cilacap	PDRB Cilacap	PDRB Jateng	PDRB Jateng	Nij	Mij	Eij 2012	Cij = Eij(rij-rin)					Dij	
	2012	2013	2012	2013	2013	2013		Rij	rin	rn	rin-rn	rij-rin		Cij
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.003.870,63	6.206.301,40	106.536.703,12	108.832.110,55	318326,56	-188968,99	6.003.870,63	0,034	0,022	0,05	-0,031	0,0122	73073,20	202430,77
Pertambangan dan Penggalian	1.743.558,00	1.863.796,74	13.745.874,30	14.594.164,05	92443,83	15155,17	1.743.558,00	0,069	0,062	0,05	0,009	0,0072	12639,74	120238,74
Industri Pengolahan	11.057.266,20	12.157.842,13	241.528.855,93	254.694.118,95	586258,72	16451,12	11.057.266,20	0,100	0,055	0,05	0,001	0,0450	497866,09	1100575,93
Pengadaan Listrik dan Gas	39.527,01	43.457,42	751.160,19	813.604,61	2095,73	1190,17	39.527,01	0,099	0,083	0,05	0,030	0,0163	644,50	3930,41
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	29.852,70	29.273,10	547.794,91	549.040,44	1582,80	-1514,92	29.852,70	-0,019	0,002	0,05	-0,051	-0,0217	-647,48	-579,60
Konstruksi	3.474.561,94	3.549.951,53	70.034.622,63	73.465.919,37	184222,05	-13988,35	3.474.561,94	0,022	0,049	0,05	-0,004	-0,0273	-94844,11	75389,59
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.740.892,54	3.775.682,41	101.058.608,68	105.825.306,31	198342,96	-21893,83	3.740.892,54	0,009	0,047	0,05	-0,006	-0,0379	-141659,26	34789,87
Transportasi dan Pergudangan	1.649.787,88	1.864.673,55	20.818.468,63	22.760.150,97	87472,12	66399,14	1.649.787,88	0,130	0,093	0,05	0,040	0,0370	61014,41	214885,67
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	684.932,11	713.634,86	20.871.604,64	21.812.570,05	36315,25	-5436,10	684.932,11	0,042	0,045	0,05	-0,008	-0,0032	-2176,40	28702,75
Informasi dan Komunikasi	1.004.837,34	1.058.971,95	24.690.219,27	26.663.583,07	53276,70	27034,84	1.004.837,34	0,054	0,080	0,05	0,027	-0,0261	-26176,93	54134,61
Jasa Keuangan dan Asuransi	559.132,93	571.527,44	18.588.738,12	19.311.454,80	29645,35	-7906,67	559.132,93	0,022	0,039	0,05	-0,014	-0,0167	-9344,17	12394,51
Real Estate	563.714,15	610.020,69	11.934.423,12	12.853.218,11	29888,25	13510,39	563.714,15	0,082	0,077	0,05	0,024	0,0052	2907,90	46306,54
Jasa Perusahaan	86.795,39	99.055,61	2.087.130,46	2.340.118,40	4601,91	5918,84	86.795,39	0,141	0,121	0,05	0,068	0,0200	1739,47	12260,22
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	830.149,36	851.071,49	20.373.579,95	20.912.828,39	44014,70	-22042,29	830.149,36	0,025	0,026	0,05	-0,027	-0,0013	-1050,28	20922,13
Jasa Pendidikan	962.194,35	1.050.630,10	22.760.883,69	24.930.587,32	51015,76	40706,36	962.194,35	0,092	0,095	0,05	0,042	-0,0034	-3286,37	88435,75
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	193.011,36	209.901,71	4.959.375,94	5.312.609,80	10233,51	3513,82	193.011,36	0,088	0,071	0,05	0,018	0,0163	3143,03	16890,35
Jasa Lainnya	474.183,09	525.882,53	10.055.072,38	10.983.732,87	25141,29	18653,03	474.183,09	0,109	0,092	0,05	0,039	0,0167	7905,12	51699,44
PDRB	33.098.266,98	35.181.674,66	691.343.115,96	726.655.118,06	1.754.877,51	-53.218,26	33.098.266,98	1,10	1,06	0,90	0,16	0,04	381.748,43	2.083.407,68

2013-2014

SEKTOR	SHIFT SHARE													
	PDRB Cilacap	PDRB Cilacap	PDRB Jateng	PDRB Jateng	Nij	Mij	Eij 2013	Cij = Eij(rij-rin)					Dij	
	2013	2014	2013	2014	2014	2014		Rij	rin	rn	rin-rn	rij-rin		Cij
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.206.301,40	6.158.626,10	108.832.110,55	107.793.380,89	329059,49	-388294,48	6.206.301,40	-0,008	-0,010	0,05	-0,063	0,0019	11559,69	-47675,30
Pertambangan dan Penggalian	1.863.796,74	2.038.906,00	14.594.164,05	15.566.648,84	98818,92	25375,52	1.863.796,74	0,094	0,067	0,05	0,014	0,0273	50914,82	175109,26
Industri Pengolahan	12.157.842,13	12.427.275,60	254.694.118,95	271.526.773,18	644611,50	158896,46	12.157.842,13	0,022	0,066	0,05	0,013	-0,0439	-534074,49	269433,47
Pengadaan Listrik dan Gas	43.457,42	45.980,00	813.604,61	866.488,30	2304,12	520,58	43.457,42	0,058	0,065	0,05	0,012	-0,0070	-302,12	2522,58
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	29.273,10	31.270,40	549.040,44	567.980,08	1552,07	-542,26	29.273,10	0,068	0,034	0,05	-0,019	0,0337	987,50	1997,30
Konstruksi	3.549.951,53	3.680.933,10	73.465.919,37	76.681.876,60	188219,22	-32820,74	3.549.951,53	0,037	0,044	0,05	-0,009	-0,0069	-24416,91	130981,57
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.775.682,41	4.068.354,50	105.825.306,31	110.899.193,58	200187,52	-19159,11	3.775.682,41	0,078	0,048	0,05	-0,005	0,0296	111643,68	292672,09
Transportasi dan Pergudangan	1.864.673,55	2.024.163,50	22.760.150,97	24.868.280,75	98865,41	73847,59	1.864.673,55	0,086	0,093	0,05	0,040	-0,0071	-13223,05	159489,95
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	713.634,86	787.181,30	21.812.570,05	23.471.641,07	37837,08	16442,21	713.634,86	0,103	0,076	0,05	0,023	0,0270	19267,15	73546,44
Informasi dan Komunikasi	1.058.971,95	1.253.535,00	26.663.583,07	30.130.161,63	56146,93	81531,85	1.058.971,95	0,184	0,130	0,05	0,077	0,0537	56884,27	194563,05
Jasa Keuangan dan Asuransi	571.527,44	615.958,40	19.311.454,80	20.106.851,64	30302,51	-6762,54	571.527,44	0,078	0,041	0,05	-0,012	0,0366	20890,99	44430,96
Real Estate	610.020,69	670.423,80	12.853.218,11	13.776.863,54	32343,43	11493,28	610.020,69	0,099	0,072	0,05	0,019	0,0272	16566,40	60403,11
Jasa Perusahaan	99.055,61	109.128,30	2.340.118,40	2.526.615,62	5251,95	2642,35	99.055,61	0,102	0,080	0,05	0,027	0,0220	2178,39	10072,69
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	851.071,49	860.731,90	20.912.828,39	21.075.646,54	45124,00	-38497,93	851.071,49	0,011	0,008	0,05	-0,045	0,0036	3034,34	9660,41
Jasa Pendidikan	1.050.630,10	1.116.730,20	24.930.587,32	27.266.220,07	55704,64	42724,09	1.050.630,10	0,063	0,094	0,05	0,041	-0,0308	-32328,63	66100,10
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	209.901,71	240.651,90	5.312.609,80	5.916.710,61	11129,04	12739,04	209.901,71	0,146	0,114	0,05	0,061	0,0328	6882,11	30750,19
Jasa Lainnya	525.882,53	565.538,30	10.983.732,87	11.917.818,01	27882,41	16840,01	525.882,53	0,075	0,085	0,05	0,032	-0,0096	-5066,64	39655,77
PDRB	35.181.674,66	36.695.388,30	726.655.118,06	764.959.150,95	1.865.340,25	-43.024,10	35.181.674,66	1,30	1,11	0,90	0,20	0,19	-308.602,50	1.513.713,64

2014-2015

SEKTOR	SHIFT SHARE													
	PDRB Cilacap	PDRB Cilacap	PDRB Jateng	PDRB Jateng	Nij	Mij	Eij 2014	Cij = Eij(rij-rin)						Dij
	2014	2015	2014	2015	2015	2015		Rij	rin	rn	rin-rn	rij-rin	Cij	
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.158.626,10	6.446.712,60	107.793.380,89	113.826.299,04	326531,73	18150,72	6.158.626,10	0,047	0,056	0,05	0,003	-0,0092	-56595,96	288086,50
Pertambangan dan Penggalian	2.038.906,00	2.145.647,80	15.566.648,84	16.040.765,67	108103,25	-46003,85	2.038.906,00	0,052	0,030	0,05	-0,023	0,0219	44642,39	106741,80
Industri Pengolahan	12.427.275,60	13.031.030,50	271.526.773,18	284.575.766,45	658896,93	-61668,77	12.427.275,60	0,049	0,048	0,05	-0,005	0,0005	6526,74	603754,90
Pengadaan Listrik dan Gas	45.980,00	44.348,00	866.488,30	887.584,37	2437,87	-1318,41	45.980,00	-0,035	0,024	0,05	-0,029	-0,0598	-2751,46	-1632,00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	31.270,40	31.300,90	567.980,08	577.261,68	1657,96	-1146,96	31.270,40	0,001	0,016	0,05	-0,037	-0,0154	-480,50	30,50
Konstruksi	3.680.933,10	3.997.282,70	76.681.876,60	81.286.113,22	195163,89	25851,65	3.680.933,10	0,086	0,060	0,05	0,007	0,0259	95334,05	316349,60
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.068.354,50	4.297.309,20	110.899.193,58	115.299.085,85	215705,06	-54294,32	4.068.354,50	0,056	0,040	0,05	-0,013	0,0166	67543,95	228954,70
Transportasi dan Pergudangan	2.024.163,50	2.117.324,10	24.868.280,75	26.807.881,97	107321,60	50553,00	2.024.163,50	0,046	0,078	0,05	0,025	-0,0320	-64714,00	93160,60
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	787.181,30	834.767,30	23.471.641,07	25.064.275,14	41736,53	11676,51	787.181,30	0,060	0,068	0,05	0,015	-0,0074	-5827,04	47586,00
Informasi dan Komunikasi	1.253.535,00	1.316.984,60	30.130.161,63	33.001.271,38	66462,71	52986,92	1.253.535,00	0,051	0,095	0,05	0,042	-0,0447	-56000,03	63449,60
Jasa Keuangan dan Asuransi	615.958,40	662.598,30	20.106.851,64	21.719.194,85	32658,25	16734,68	615.958,40	0,076	0,080	0,05	0,027	-0,0045	-2753,03	46639,90
Real Estate	670.423,80	720.538,80	13.776.863,54	14.822.295,08	35546,02	15327,84	670.423,80	0,075	0,076	0,05	0,023	-0,0011	-758,86	50115,00
Jasa Perusahaan	109.128,30	119.733,90	2.526.615,62	2.741.142,86	5786,01	3479,74	109.128,30	0,097	0,085	0,05	0,032	0,0123	1339,85	10605,60
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	860.731,90	913.791,10	21.075.646,54	22.194.694,80	45636,20	65,87	860.731,90	0,062	0,053	0,05	0,000	0,0085	7357,14	53059,20
Jasa Pendidikan	1.116.730,20	1.189.706,00	27.266.220,07	29.324.081,90	59209,28	25073,63	1.116.730,20	0,065	0,075	0,05	0,022	-0,0101	-11307,11	72975,80
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	240.651,90	262.244,90	5.916.710,61	6.307.617,26	12759,42	3140,03	240.651,90	0,090	0,066	0,05	0,013	0,0237	5693,55	21593,00
Jasa Lainnya	565.538,30	588.446,50	11.917.818,01	12.300.030,67	29984,97	-11847,76	565.538,30	0,041	0,032	0,05	-0,021	0,0084	4771,00	22908,20
PDRB	36.695.388,30	38.719.767,20	764.959.150,95	806.775.362,19	1.945.597,68	46.760,54	36.695.388,30	0,92	0,98	0,90	0,08	-0,07	32.020,68	2.024.378,90

Sumber : Lampiran A dan B (diolah)

## Lampiran D

## Rata-rata Kinerja Sektor Ekonomi Pada Pertumbuhan Ekonomi

SEKTOR		Komponen			Pergeseran Struktur Ekonomi
		Petumbuhan Nasional	Bauran Industri	Keunggulan Kompetitif	Pertumbuhan
		(Nij)	(Mij)	(Cij)	(Dij)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	314874,33	-154104,85	6071,89	166841,37
2	Pertambangan dan Penggalian	100349,88	-33877,44	-74793,46	-8321,01
3	Industri Pengolahan	588011,09	50429,80	108190,30	746631,19
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2089,12	542,34	-266,68	2364,78
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1603,90	-1237,16	-83,09	283,64
6	Konstruksi	183121,24	-17140,07	-12863,13	153118,05
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	197621,98	-25252,47	20807,85	193177,36
8	Transportasi dan Pergudangan	90277,46	40516,05	2474,93	133268,44
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	36368,91	4873,65	6395,79	47638,38
10	Informasi dan Komunikasi	53637,00	44929,24	-628,47	97937,82
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	29750,49	-2674,33	3738,65	30814,81
12	Real Estate	30253,08	8957,58	8776,86	47987,51
13	Jasa Perusahaan	4759,75	3282,85	1348,24	9390,83
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	44248,95	-24447,51	2786,38	22587,82
15	Jasa Pendidikan	49643,60	60932,08	-13295,56	97280,13
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10362,41	7049,52	3861,81	21273,74
17	Jasa Lainnya	26310,91	-1904,85	3101,17	27507,23
<b>Jumlah</b>		<b>1763284,09</b>	<b>-39125,56</b>	<b>65623,48</b>	<b>1789782,01</b>
<b>Prosentase Terhadap Pertumbuhan</b>		<b>98,52</b>	<b>-2,19</b>	<b>3,67</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Lampiran C (diolah)

**Lampiran E****KUESIONER ANALITICAL HIERARCHI PROCESS (AHP)  
BAGI RESPONDEN ATAS PERUMUSAN KEBIJAKAN PERENCANAAN  
EKONOMI WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP****1. Penjelasan Singkat Penelitian**

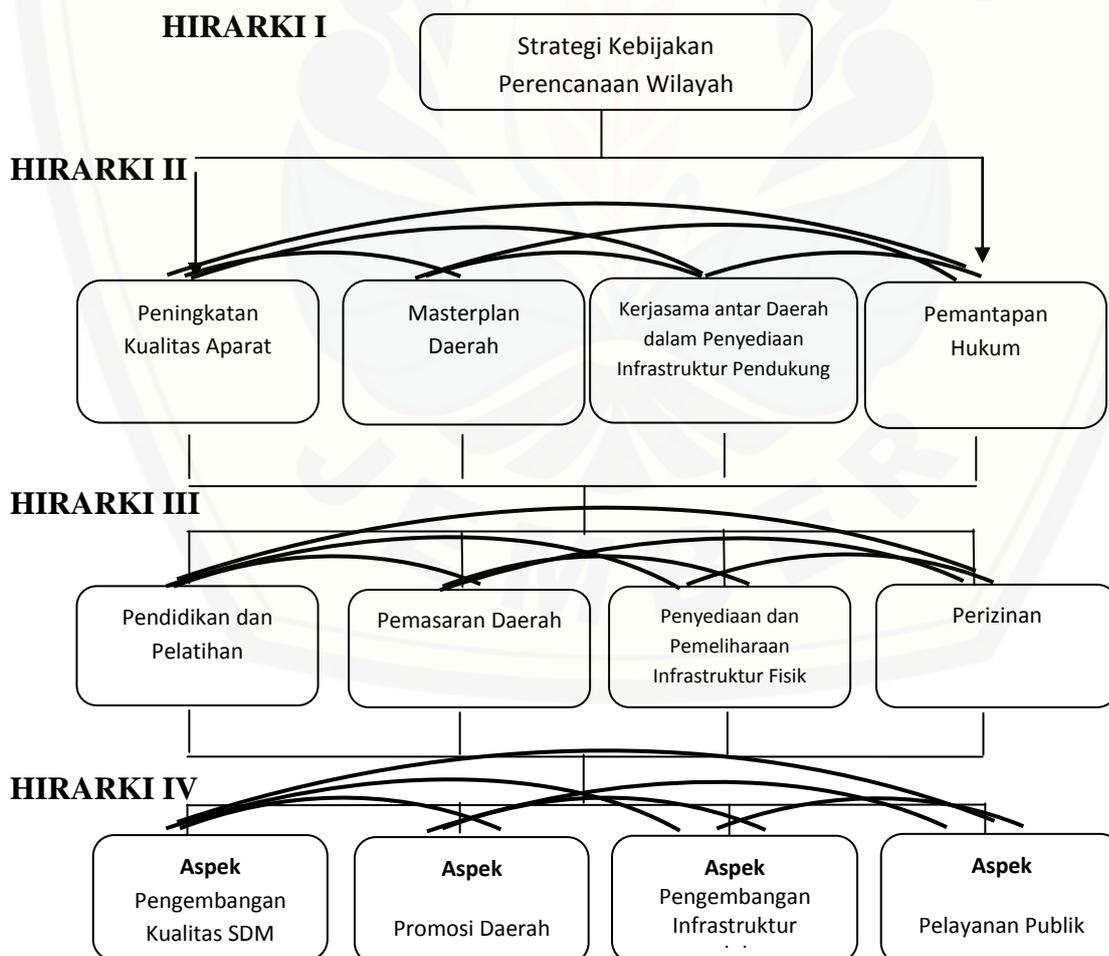
- a. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi atau penilaian responden yang dianggap ekspert atas perumusan suatu kebijakan yang prioritas dalam rangka perencanaan ekonomi wilayah di Kabupaten Cilacap.
- b. Kegunaan penelitian ini adalah untuk melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 Universitas Jember. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi masukan dalam upaya Perencanaan wilayah terutama dengan sektor unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Cilacap.
- c. Persepsi atau penilaian responden atas aspek dan kriteria yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dari masyarakat yang dianggap ekspert, mengerti akan suatu permasalahan tersebut. Sehubungan dengan perumusan prioritas kebijakan dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah di Kabupaten Cilacap, maka yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah pihak pemerintah dalam hal ini Setda dan Bappelitbangda.
- d. Mengingat pentingnya masukan dari Bapak/Ibu, mohon kiranya dapat memberikan penilaian dalam kuesioner berikut.  
Kami menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan Bapak/Ibu, maka penulisan skripsi ini tidak terwujud.
- e. Karena sifatnya penelitian, maka segala masukan yang Bapak/Ibu berikan akan dijamin kerahasiannya.

## 2. Prinsip Dasar AHP

AHP adalah suatu metode pengambilan keputusan, bentuknya sederhana, fleksibel dan berguna untuk mendukung suatu proses pengambilan keputusan yang multi kriteria, multi tujuan dan penuh dengan situasi kompleks. Ciri utama proses AHP adalah dengan memecahkan suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur kedalam kelompok-kelompok, kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki.

Input utama dari AHP adalah penilaian responden. Sedangkan inti dari proses AHP adalah membandingkan tingkat prioritas beberapa elemen atau variabel pada suatu level atau tingkatan dari suatu susunan hirarki. Hasil dari proses perbandingan tersebut diberi bobot secara numerik sehingga variabel yang mendapat prioritas tertinggi dalam akhir proses analisis akan menjadi pilihan yang terbaik.

Mohon Bapak/Ibu mencermati stuktur hirarki pada gambar berikut, mengenai strategi kebijakan dalam rangka Pengembangan Pembangunan di Kabupaten Cilacap yang di dasarkan pada keunggulan kompetitif daerah.



**Keterangan :**

- Hirarki I merupakan tujuan yang akan dicapai.
- Hirarki II merupakan kriteria, yaitu kriteria apa saja yang harus dipenuhi dalam penyelesaian agar layak untuk menjadi pilihan yang paling ideal.
- Hirarki III merupakan subkriteria, yaitu dimana pada kriteria tidak ditemukan titik pemecahan suatu masalah maka menggunakan penyelesaian subkriteria.
- Hirarki IV merupakan alternatif, yaitu proses pemilihan penyelesaian masalah.

**3. Petunjuk Pengisian Kuesioner AHP**

- a. Penilaian (Judgment) terhadap elemen-elemen dari setiap level hierarki didasarkan atas bobot prioritas atau kepentingannya. Penilaian pada responden dinyatakan secara numerik (skala 1 sampai 9) dengan devinisi verbal sebagai berikut :

Intensitas Pentingnya	Definisi	Penjelasan
1	Sama penting	A dan B sama penting
3	Sedikit lebih penting	A sedikit lebih penting dari B
5	Agak lebih penting	A agak lebih penting dari B
7	Jauh lebih penting	A jauh lebih penting dari B
9	Mutlak lebih penting	A mutlak lebih penting dari B
2,4,6,8	Nilai antara angka diatas	Ragu-ragu dalam menentukan skala missal 6 antara 5 dan 7
Reciprocal	Jika $A/B=9$ maka $B/A=1/9$	Asumsi masuk akal

- b. Proses penilaian kepentingan relatif antara dua elemen tersebut dan belaku reciprocal, artinya jika elemen  $i$  dinilai 3 kali lebih penting dibandingkan elemen  $j$ , maka elemen  $j$  harus sama dengan  $1/3$  kali lebih penting dibandingkan elemen  $i$ .
- c. Jika elemen pada kolom sebelah kiri (kolom 1) lebih penting dibandingkan dengan elemen sebelah kanan (kolom 2), maka nilai perbandingan ditulis pada belahan sebelah kiri dan jika sebaliknya, maka ditulis sebelah kanan.

4. Lembar Pertanyaan Responden sebagai berikut:

**LEMBAR PERTANYAAN**

**Responden 1**

Nama : Edi Daryanto  
 Instansi : Setda Cilacap  
 Alamat / Tlp : Cilacap  
 Tanggal Pengisian : 20 Juni 2017

1. Dari HIRARKI II berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Cilacap? (Bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 dengan beberapa aspek di baris yang sama pada kolom 2).

Aspek Prioritas Kebijakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek Prioritas Kebijakan
Peningkatan Kualitas Aparat			✓															Masterplan Daerah
Peningkatan Kualitas Aparat															✓			Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Peningkatan Kualitas Aparat													✓					Pemantapan Hukum
Masterplan Daerah			✓															Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Masterplan Daerah			✓															Pemantapan Hukum
Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung			✓															Pemantapan Hukum



3. Dari HIRARKI IV berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Cilacap? (Bandingkan kriteria pada kolom 1 dengan kriteria di baris yang sama pada kolom 2).

Aspek Prioritas Kebijakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek Prioritas Kebijakan
Pengembangan SDM			✓															Promosi Daerah
Pengembangan SDM															✓			Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Pengembangan SDM													✓					Pelayanan Publik
Promosi Daerah			✓															Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Promosi Daerah			✓															Pelayanan Publik
Pengembangan Infrastruktur Pendukung			✓															Pelayanan Publik

**LEMBAR PERTANYAAN**

**Responden 2**

Nama : Edi Sukarto  
 Instansi : Setda Cilacap  
 Alamat / Tlp : Cilacap  
 Tanggal Pengisian : 20 Juni 2017

1. Dari HIRARKI II berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Cilacap? (Bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 dengan beberapa aspek di baris yang sama pada kolom 2).

Aspek Prioritas Kebijakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek Prioritas Kebijakan
Peningkatan Kualitas Aparat					✓													Masterplan Daerah
Peningkatan Kualitas Aparat									✓									Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Peningkatan Kualitas Aparat									✓									Pemantapan Hukum
Masterplan Daerah									✓									Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Masterplan Daerah							✓											Pemantapan Hukum
Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung					✓													Pemantapan Hukum



3. Dari HIRARKI IV berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Cilacap? (Bandingkan kriteria pada kolom 1 dengan kriteria di baris yang sama pada kolom 2).

Aspek Prioritas Kebijakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek Prioritas Kebijakan
Pengembangan SDM													✓					Promosi Daerah
Pengembangan SDM													✓					Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Pengembangan SDM													✓					Pelayanan Publik
Promosi Daerah															✓			Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Promosi Daerah			✓															Pelayanan Publik
Pengembangan Infrastruktur Pendukung			✓															Pelayanan Publik

## LEMBAR PERTANYAAN

## Responden 3

Nama : Umi Rohmah  
 Instansi : Setda Cilacap  
 Alamat / Tlp : Cilacap  
 Tanggal Pengisian : 20 Juni 2017

1. Dari HIRARKI II berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Cilacap? (Bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 dengan beberapa aspek di baris yang sama pada kolom 2).

Aspek Prioritas Kebijakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek Prioritas Kebijakan
Peningkatan Kualitas Aparat															✓			Masterplan Daerah
Peningkatan Kualitas Aparat													✓					Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Peningkatan Kualitas Aparat													✓					Pemantapan Hukum
Masterplan Daerah															✓			Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Masterplan Daerah			✓															Pemantapan Hukum
Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung			✓															Pemantapan Hukum



3. Dari HIRARKI IV berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Cilacap? (Bandingkan kriteria pada kolom 1 dengan kriteria di baris yang sama pada kolom 2).

Aspek Prioritas Kebijakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek Prioritas Kebijakan
Pengembangan SDM					✓													Promosi Daerah
Pengembangan SDM									✓									Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Pengembangan SDM									✓									Pelayanan Publik
Promosi Daerah									✓									Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Promosi Daerah							✓											Pelayanan Publik
Pengembangan Infrastruktur Pendukung					✓													Pelayanan Publik

## LEMBAR PERTANYAAN

## Responden 4

Nama : Mubarak. SE  
 Instansi : Setda Cilacap  
 Alamat / Tlp : Cilacap  
 Tanggal Pengisian : 20 Juni 2017

1. Dari HIRARKI II berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Cilacap? (Bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 dengan beberapa aspek di baris yang sama pada kolom 2).

Aspek Prioritas Kebijakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek Prioritas Kebijakan
Peningkatan Kualitas Aparat									✓									Masterplan Daerah
Peningkatan Kualitas Aparat													✓					Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Peningkatan Kualitas Aparat													✓					Pemantapan Hukum
Masterplan Daerah												✓						Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Masterplan Daerah												✓						Pemantapan Hukum
Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung									✓									Pemantapan Hukum



3. Dari HIRARKI IV berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Cilacap? (Bandingkan kriteria pada kolom 1 dengan kriteria di baris yang sama pada kolom 2).

Aspek Prioritas Kebijakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek Prioritas Kebijakan
Pengembangan SDM									✓									Promosi Daerah
Pengembangan SDM									✓									Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Pengembangan SDM											✓							Pelayanan Publik
Promosi Daerah									✓									Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Promosi Daerah									✓									Pelayanan Publik
Pengembangan Infrastruktur Pendukung									✓									Pelayanan Publik

## LEMBAR PERTANYAAN

## Responden 5

Nama : Muhajir  
 Instansi : Setda Cilacap  
 Alamat / Tlp : Cilacap  
 Tanggal Pengisian : 20 Juni 2017

1. Dari HIRARKI II berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Cilacap? (Bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 dengan beberapa aspek di baris yang sama pada kolom 2).

Aspek Prioritas Kebijakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek Prioritas Kebijakan
Peningkatan Kualitas Aparat									✓									Masterplan Daerah
Peningkatan Kualitas Aparat													✓					Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Peningkatan Kualitas Aparat													✓					Pemantapan Hukum
Masterplan Daerah												✓						Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Masterplan Daerah												✓						Pemantapan Hukum
Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung												✓						Pemantapan Hukum



3. Dari HIRARKI IV berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Cilacap? (Bandingkan kriteria pada kolom 1 dengan kriteria di baris yang sama pada kolom 2).

Aspek Prioritas Kebijakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek Prioritas Kebijakan
Pengembangan SDM									✓									Promosi Daerah
Pengembangan SDM									✓									Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Pengembangan SDM											✓							Pelayanan Publik
Promosi Daerah							✓											Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Promosi Daerah							✓											Pelayanan Publik
Pengembangan Infrastruktur Pendukung							✓											Pelayanan Publik

**LEMBAR PERTANYAAN**

**Responden 6**

Nama : Karwarsih  
 Instansi : Setda Cilacap  
 Alamat / Tlp : Cilacap  
 Tanggal Pengisian : 20 Juni 2017

1. Dari HIRARKI II berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Cilacap? (Bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 dengan beberapa aspek di baris yang sama pada kolom 2).

Aspek Prioritas Kebijakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek Prioritas Kebijakan
Peningkatan Kualitas Aparat					✓													Masterplan Daerah
Peningkatan Kualitas Aparat									✓									Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Peningkatan Kualitas Aparat									✓									Pemantapan Hukum
Masterplan Daerah									✓									Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Masterplan Daerah							✓											Pemantapan Hukum
Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung					✓													Pemantapan Hukum



3. Dari HIRARKI IV berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Cilacap? (Bandingkan kriteria pada kolom 1 dengan kriteria di baris yang sama pada kolom 2).

Aspek Prioritas Kebijakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek Prioritas Kebijakan
Pengembangan SDM													✓					Promosi Daerah
Pengembangan SDM															✓			Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Pengembangan SDM													✓					Pelayanan Publik
Promosi Daerah															✓			Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Promosi Daerah			✓															Pelayanan Publik
Pengembangan Infrastruktur Pendukung			✓															Pelayanan Publik

**LEMBAR PERTANYAAN**

**Responden 7**

Nama : Galih G.  
 Instansi : Setda Cilacap  
 Alamat / Tlp : Cilacap/ 085726202340  
 Tanggal Pengisian : 20 Juni 2017

1. Dari HIRARKI II berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Cilacap? (Bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 dengan beberapa aspek di baris yang sama pada kolom 2).

Aspek Prioritas Kebijakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek Prioritas Kebijakan
Peningkatan Kualitas Aparat							✓											Masterplan Daerah
Peningkatan Kualitas Aparat					✓													Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Peningkatan Kualitas Aparat					✓													Pemantapan Hukum
Masterplan Daerah							✓											Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Masterplan Daerah							✓											Pemantapan Hukum
Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung												✓						Pemantapan Hukum



3. Dari HIRARKI IV berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Cilacap? (Bandingkan kriteria pada kolom 1 dengan kriteria di baris yang sama pada kolom 2).

Aspek Prioritas Kebijakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek Prioritas Kebijakan
Pengembangan SDM									✓									Promosi Daerah
Pengembangan SDM									✓									Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Pengembangan SDM									✓									Pelayanan Publik
Promosi Daerah									✓									Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Promosi Daerah									✓									Pelayanan Publik
Pengembangan Infrastruktur Pendukung									✓									Pelayanan Publik

**LEMBAR PERTANYAAN**

**Responden 8**

Nama : Susilowati  
 Instansi : Setda Cilacap  
 Alamat / Tlp : Cilacap  
 Tanggal Pengisian : 04 Juli 2017

1. Dari HIRARKI II berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Cilacap? (Bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 dengan beberapa aspek di baris yang sama pada kolom 2).

Aspek Prioritas Kebijakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek Prioritas Kebijakan
Peningkatan Kualitas Aparat					✓													Masterplan Daerah
Peningkatan Kualitas Aparat			✓															Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Peningkatan Kualitas Aparat			✓															Pemantapan Hukum
Masterplan Daerah									✓									Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Masterplan Daerah									✓									Pemantapan Hukum
Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung							✓											Pemantapan Hukum



3. Dari HIRARKI IV berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Cilacap? (Bandingkan kriteria pada kolom 1 dengan kriteria di baris yang sama pada kolom 2).

Aspek Prioritas Kebijakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek Prioritas Kebijakan
Pengembangan SDM									✓									Promosi Daerah
Pengembangan SDM									✓									Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Pengembangan SDM									✓									Pelayanan Publik
Promosi Daerah							✓											Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Promosi Daerah									✓									Pelayanan Publik
Pengembangan Infrastruktur Pendukung									✓									Pelayanan Publik

**LEMBAR PERTANYAAN**

**Responden 9**

Nama : Her Sri Nintowati  
 Instansi : Bappelitbangda Kab. Cilacap  
 Alamat / Tlp : Cilacap  
 Tanggal Pengisian : 10 Juli 2017

1. Dari HIRARKI II berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Cilacap? (Bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 dengan beberapa aspek di baris yang sama pada kolom 2).

Aspek Prioritas Kebijakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek Prioritas Kebijakan
Peningkatan Kualitas Aparat									✓									Masterplan Daerah
Peningkatan Kualitas Aparat									✓									Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Peningkatan Kualitas Aparat									✓									Pemantapan Hukum
Masterplan Daerah							✓											Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Masterplan Daerah									✓									Pemantapan Hukum
Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung									✓									Pemantapan Hukum



3. Dari HIRARKI IV berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Cilacap? (Bandingkan kriteria pada kolom 1 dengan kriteria di baris yang sama pada kolom 2).

Aspek Prioritas Kebijakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek Prioritas Kebijakan
Pengembangan SDM									✓									Promosi Daerah
Pengembangan SDM									✓									Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Pengembangan SDM									✓									Pelayanan Publik
Promosi Daerah											✓							Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Promosi Daerah									✓									Pelayanan Publik
Pengembangan Infrastruktur Pendukung									✓									Pelayanan Publik

## LEMBAR PERTANYAAN

## Responden 10

Nama : Titin Indriati  
 Instansi : Bappelitbangda Kab. Cilacap  
 Alamat / Tlp : Jl. Kauman No.28 B Cilacap  
 Tanggal Pengisian : 10 Juli 2017

1. Dari HIRARKI II berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Cilacap? (Bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 dengan beberapa aspek di baris yang sama pada kolom 2).

Aspek Prioritas Kebijakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek Prioritas Kebijakan
Peningkatan Kualitas Aparat									✓									Masterplan Daerah
Peningkatan Kualitas Aparat							✓											Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Peningkatan Kualitas Aparat									✓									Pemantapan Hukum
Masterplan Daerah							✓											Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Masterplan Daerah									✓									Pemantapan Hukum
Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung									✓									Pemantapan Hukum



3. Dari HIRARKI IV berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Cilacap? (Bandingkan kriteria pada kolom 1 dengan kriteria di baris yang sama pada kolom 2).

Aspek Prioritas Kebijakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek Prioritas Kebijakan
Pengembangan SDM									✓									Promosi Daerah
Pengembangan SDM									✓									Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Pengembangan SDM					✓													Pelayanan Publik
Promosi Daerah									✓									Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Promosi Daerah									✓									Pelayanan Publik
Pengembangan Infrastruktur Pendukung									✓									Pelayanan Publik

**LEMBAR PERTANYAAN**

**Responden 11**

Nama : Yuli Restanti  
 Instansi : Bappelitbangda Kab. Cilacap  
 Alamat / Tlp : Cilacap/ 085869342718  
 Tanggal Pengisian : 06 Juli 2017

1. Dari HIRARKI II berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Cilacap? (Bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 dengan beberapa aspek di baris yang sama pada kolom 2).

Aspek Prioritas Kebijakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek Prioritas Kebijakan
Peningkatan Kualitas Aparat			✓															Masterplan Daerah
Peningkatan Kualitas Aparat									✓									Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Peningkatan Kualitas Aparat							✓											Pemantapan Hukum
Masterplan Daerah									✓									Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Masterplan Daerah											✓							Pemantapan Hukum
Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung									✓									Pemantapan Hukum



3. Dari HIRARKI IV berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Cilacap? (Bandingkan kriteria pada kolom 1 dengan kriteria di baris yang sama pada kolom 2).

Aspek Prioritas Kebijakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek Prioritas Kebijakan
Pengembangan SDM									✓									Promosi Daerah
Pengembangan SDM									✓									Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Pengembangan SDM									✓									Pelayanan Publik
Promosi Daerah									✓									Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Promosi Daerah									✓									Pelayanan Publik
Pengembangan Infrastruktur Pendukung									✓									Pelayanan Publik

## LEMBAR PERTANYAAN

## Responden 12

Nama : Iwan Hasan  
 Instansi : Bappelitbangda Kab. Cilacap  
 Alamat / Tlp : Cilacap/ 087737570906  
 Tanggal Pengisian : 05 Juli 2017

1. Dari HIRARKI II berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Cilacap? (Bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 dengan beberapa aspek di baris yang sama pada kolom 2).

Aspek Prioritas Kebijakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek Prioritas Kebijakan
Peningkatan Kualitas Aparat			✓															Masterplan Daerah
Peningkatan Kualitas Aparat					✓													Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Peningkatan Kualitas Aparat									✓									Pemantapan Hukum
Masterplan Daerah											✓							Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Masterplan Daerah									✓									Pemantapan Hukum
Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung											✓							Pemantapan Hukum



3. Dari HIRARKI IV berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Cilacap? (Bandingkan kriteria pada kolom 1 dengan kriteria di baris yang sama pada kolom 2).

Aspek Prioritas Kebijakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek Prioritas Kebijakan
Pengembangan SDM									✓									Promosi Daerah
Pengembangan SDM											✓							Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Pengembangan SDM									✓									Pelayanan Publik
Promosi Daerah											✓							Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Promosi Daerah									✓									Pelayanan Publik
Pengembangan Infrastruktur Pendukung					✓													Pelayanan Publik

**LEMBAR PERTANYAAN**

**Responden 13**

Nama : Rosa  
 Instansi : Bappelitbangda Kab. Cilacap  
 Alamat / Tlp : Jl. Kauman No.28 B Cilacap/ 0282533797  
 Tanggal Pengisian : 5 Juli 2017

1. Dari HIRARKI II berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Cilacap? (Bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 dengan beberapa aspek di baris yang sama pada kolom 2).

Aspek Prioritas Kebijakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek Prioritas Kebijakan
Peningkatan Kualitas Aparat																	✓	Masterplan Daerah
Peningkatan Kualitas Aparat		✓																Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Peningkatan Kualitas Aparat																	✓	Pemantapan Hukum
Masterplan Daerah	✓																	Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Masterplan Daerah									✓									Pemantapan Hukum
Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung									✓									Pemantapan Hukum



3. Dari HIRARKI IV berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Cilacap? (Bandingkan kriteria pada kolom 1 dengan kriteria di baris yang sama pada kolom 2).

Aspek Prioritas Kebijakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek Prioritas Kebijakan
Pengembangan SDM			✓															Promosi Daerah
Pengembangan SDM									✓									Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Pengembangan SDM																	✓	Pelayanan Publik
Promosi Daerah																✓		Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Promosi Daerah																	✓	Pelayanan Publik
Pengembangan Infrastruktur Pendukung																	✓	Pelayanan Publik

**LEMBAR PERTANYAAN**

**Responden 14**

Nama : Yani Astuti  
 Instansi : Bappelitbangda Kab.Cilacap  
 Alamat / Tlp : Jl. Kauman No.28 B Cilacap/ 0282533797  
 Tanggal Pengisian : 06 Juli 2017

1. Dari HIRARKI II berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Cilacap? (Bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 dengan beberapa aspek di baris yang sama pada kolom 2).

Aspek Prioritas Kebijakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek Prioritas Kebijakan
Peningkatan Kualitas Aparat	✓																	Masterplan Daerah
Peningkatan Kualitas Aparat			✓															Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Peningkatan Kualitas Aparat									✓									Pemantapan Hukum
Masterplan Daerah									✓									Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Masterplan Daerah									✓									Pemantapan Hukum
Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung									✓									Pemantapan Hukum



3. Dari HIRARKI IV berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Cilacap? (Bandingkan kriteria pada kolom 1 dengan kriteria di baris yang sama pada kolom 2).

Aspek Prioritas Kebijakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek Prioritas Kebijakan
Pengembangan SDM									✓									Promosi Daerah
Pengembangan SDM															✓			Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Pengembangan SDM															✓			Pelayanan Publik
Promosi Daerah									✓									Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Promosi Daerah															✓			Pelayanan Publik
Pengembangan Infrastruktur Pendukung			✓															Pelayanan Publik

**LEMBAR PERTANYAAN**

**Responden 15**

Nama : Sunarko, SE.  
 Instansi : Bappelitbangda Kab. Cilacap  
 Alamat / Tlp : Jl. Kauman No.28 B Cilacap  
 Tanggal Pengisian : 10 Juli 2017

1. Dari HIRARKI II berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Cilacap? (Bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 dengan beberapa aspek di baris yang sama pada kolom 2).

Aspek Prioritas Kebijakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek Prioritas Kebijakan
Peningkatan Kualitas Aparat									✓									Masterplan Daerah
Peningkatan Kualitas Aparat							✓											Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Peningkatan Kualitas Aparat							✓											Pemantapan Hukum
Masterplan Daerah					✓													Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Masterplan Daerah							✓											Pemantapan Hukum
Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung									✓									Pemantapan Hukum



3. Dari HIRARKI IV berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Cilacap? (Bandingkan kriteria pada kolom 1 dengan kriteria di baris yang sama pada kolom 2).

Aspek Prioritas Kebijakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek Prioritas Kebijakan
Pengembangan SDM					✓													Promosi Daerah
Pengembangan SDM							✓											Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Pengembangan SDM							✓											Pelayanan Publik
Promosi Daerah											✓							Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Promosi Daerah									✓									Pelayanan Publik
Pengembangan Infrastruktur Pendukung													✓					Pelayanan Publik

**LEMBAR PERTANYAAN**

**Responden 16**

Nama : Kurniawan Aris P.  
 Instansi : Bappelitbangda Kab. Cilacap  
 Alamat / Tlp : Jl. Kauman No.28 B Cilacap  
 Tanggal Pengisian : 11 Juli 2017

1. Dari HIRARKI II berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Cilacap? (Bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 dengan beberapa aspek di baris yang sama pada kolom 2).

Aspek Prioritas Kebijakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek Prioritas Kebijakan
Peningkatan Kualitas Aparat							✓											Masterplan Daerah
Peningkatan Kualitas Aparat							✓											Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Peningkatan Kualitas Aparat							✓											Pemantapan Hukum
Masterplan Daerah					✓													Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Masterplan Daerah							✓											Pemantapan Hukum
Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung											✓							Pemantapan Hukum



3. Dari HIRARKI IV berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu strategi yang paling prioritas dalam rangka perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Cilacap? (Bandingkan kriteria pada kolom 1 dengan kriteria di baris yang sama pada kolom 2).

Aspek Prioritas Kebijakan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek Prioritas Kebijakan
Pengembangan SDM							✓											Promosi Daerah
Pengembangan SDM							✓											Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Pengembangan SDM							✓											Pelayanan Publik
Promosi Daerah											✓							Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Promosi Daerah											✓							Pelayanan Publik
Pengembangan Infrastruktur Pendukung									✓									Pelayanan Publik

## Lampiran F

## Niali Geomean Kriteria Kebijakan Perencanaan Pembangunan Wilayah Kabupaten Cilacap Hirarki II

(Pembobotan Secara Total, yang diperoleh dari keseluruhan nilai Responden)

Aspek Prioritas Kebijakan	JAWABAN RESPONDEN																Aspek Prioritas Kebijakan	Nilai Geomean
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Peningkatan Kualitas Aparat	7	5	7	1	1	5	3	5	1	1	7	7	9	9	1	3	Masterplan Daerah	3,320869858
Peningkatan Kualitas Aparat	7	1	5	5	5	1	5	7	1	3	1	5	8	7	3	3	Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung	3,332632063
Peningkatan Kualitas Aparat	5	1	5	5	5	1	5	7	1	1	3	1	9	1	3	3	Pemantapan Hukum	2,632371293
Masterplan Daerah	7	1	7	3	3	1	3	1	3	3	1	3	9	1	5	5	Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung	2,701277075
Masterplan Daerah	7	3	7	3	3	3	3	1	1	1	3	1	1	1	3	3	Pemantapan Hukum	2,209011020
Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung	7	5	7	1	3	5	3	3	1	1	1	3	1	1	1	3	Pemantapan Hukum	2,198411047

Sumber : Lampiran E (diolah)

## Lampiran G

## Niali Geomean Kriteria Kebijakan Perencanaan Pembangunan Wilayah Kabupaten Cilacap Hirarki III

(Pembobotan Secara Total, yang diperoleh dari keseluruhan nilai Responden)

Aspek Prioritas Kebijakan	JAWABAN RESPONDEN																Aspek Prioritas Kebijakan	Nilai Geomean
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Pendidikan dan Pelatihan	5	7	7	3	3	5	1	1	1	3	7	3	6	5	5	3	Pemasaran Daerah	3,395730605
Pendidikan dan Pelatihan	1	7	7	5	5	7	5	1	1	1	7	3	8	7	5	1	Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Fisik	3,350416827
Pendidikan dan Pelatihan	1	5	5	5	5	7	5	3	3	1	1	3	4	5	7	3	Perizinan	3,347033582
Pemasaran Daerah	1	7	7	3	3	7	3	1	1	2	1	5	7	7	3	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Fisik	2,990153818
Pemasaran Daerah	3	7	7	3	3	7	3	3	1	1	3	1	4	7	3	3	Perizinan	3,072301881
Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Fisik	5	7	7	2	3	7	3	1	1	1	5	5	8	1	3	3	Perizinan	3,048249919

Sumber : Lampiran E (diolah)

**Lampiran H**

**Nilai Geomen Aspek Prioritas Kebijakan Perencanaan Pembangunan wilayah Kabupaten Cilacap Hirarki IV**

**(Pembobotan Secara Total, yang diperoleh dari keseluruhan nilai Responden).**

Aspek Prioritas Kebijakan	JAWABAN RESPONDEN																Aspek Prioritas Kebijakan	Nilai Geomean							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
Pengembangan Kualitas SDM	7		5	7	1		1		5	1	1	1	1	1	7	1	5	3	Promosi Daerah	2,086089018					
Pengembangan Kualitas SDM		7		5	5	1		1		7	1	1	1	1	3	1		7	3	3	Pengembangan Infrastruktur Pendukung	2,164150046			
Pengembangan Kualitas SDM		5		5	5	3		3		5	1	1	1	5	1	1		9	7	3	3	Pelayanan Publik	2,819468354		
Promosi Daerah	7			7	7	1		3		7	1	3	3	1	1	3		7	1		3	3	Pengembangan Infrastruktur Pendukung	2,773407004	
Promosi Daerah	7		7		7	1		3		7		1	1	1	1	1		9	7	1		3	Pelayanan Publik	2,417538790	
Pengembangan Infrastruktur Pendukung	7		7		7	1		3		7		1	1	1	1	1	5		9	7		5	1	Pelayanan Publik	2,760098768

Sumber : Lampiran E (diolah)

**Lampiran I****Matriks Pair-Wise dan Matriks Priority Kriteria Hirarki II****Dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah Kabupaten Cilacap.****Matriks Pair-Wise**

Strategi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Wilayah	Peningkatan Kualitas Aparat	Masterplan Daerah	Kerjasama antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung	Pemantapan Hukum
Peningkatan Kualitas Aparat	1	3,320869858	3,332632063	2,632371293
Masterplan Daerah	0,301125923	1	2,701277075	2,20901102
Kerjasama antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung	0,300063128	0,370195271	1	2,198411047
Pemantapan Hukum	0,37988562	0,452691268	0,370195271	1
Jumlah	1,981074670	5,143756398	7,404104409	8,039793360

Sumber : Lampiran F (diolah)

**Matriks Priority**

Strategi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Wilayah	Peningkatan Kualitas Aparat	Masterplan Daerah	Kerjasama antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung	Pemantapan Hukum	Priority Vector
Peningkatan Kualitas Aparat	0,504776531	0,645611806	0,450106033	0,32741778	0,481978038
Masterplan Daerah	0,152001299	0,194410451	0,364835087	0,274759676	0,246501628
Kerjasama antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung	0,151464825	0,07196983	0,135060224	0,273441238	0,157984029
Pemantapan Hukum	0,191757345	0,088007914	0,049998656	0,124381306	0,113536305
Jumlah	1	1	1	1	

Sumber : Lampiran F(diolah)

**Lampiran J**

**Matriks Pair-Wise dan Matriks Priority Kriteria Hirarki III**

**Dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah Kabupaten Cilacap.**

**Matriks Pair-Wise**

Strategi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Wilayah	Pendidikan dan Pelatihan	Pemasaran Daerah	Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Fisik	Perizinan
Pendidikan dan Pelatihan	1	3,395730605	3,350416827	3,347033582
Pemasaran Daerah	0,294487436	1	2,990153818	3,072301881
Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Fisik	0,298470325	0,334430956	1	3,048249919
Perizinan	0,298772025	0,325488848	0,334430956	1
Jumlah	1,891729786	5,055650409	7,675001601	10,467585382

Sumber : Lampiran F (diolah)

**Matriks Priority**

Strategi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Wilayah	Pendidikan dan Pelatihan	Pemasaran Daerah	Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Fisik	Perizinan	Priority Vector
Pendidikan dan Pelatihan	0,528616723	0,671670375	0,436536303	0,319752212	0,489143903
Pemasaran Daerah	0,155670983	0,197798487	0,389596507	0,293506264	0,25914306
Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Fisik	0,157776405	0,066149937	0,130293132	0,291208508	0,161356996
Perizinan	0,157935889	0,064381202	0,043574057	0,095533016	0,090356041
Jumlah	1	1	1	1	1

Sumber : Lampiran F (diolah)

**Lampiran K****Matriks Pair-Wise dan Matriks Priority Kriteria Hirarki IV  
Dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah Kabupaten Cilacap.****Matriks Pair-Wise**

Strategi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Wilayah	Aspek Pengembangan Kualitas SDM	Aspek Promosi Daerah	Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung	Aspek Pelayanan Publik
Aspek Pengembangan Kualitas SDM	1	2,086089018	2,164150046	2,819468354
Aspek Promosi Daerah	0,479365929	1	2,773407004	2,41753879
Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung	0,46207517	0,360567345	1	2,760098768
Aspek Pelayanan Publik	0,354676795	0,413643828	0,360567345	1
Jumlah	2,296117894	3,860300191	6,298124395	8,997105912

Sumber : Lampiran F (diolah)

**Matriks Priority**

Strategi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Wilayah	Aspek Pengembangan Kualitas SDM	Aspek Promosi Daerah	Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung	Aspek Pelayanan Publik	Priority Vector
Aspek Pengembangan Kualitas SDM	0,435517707	0,540395543	0,343618181	0,313375032	0,408226616
Aspek Promosi Daerah	0,208772350	0,259047211	0,440354434	0,268701826	0,294218956
Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung	0,201241918	0,093403965	0,158777429	0,306776290	0,190049901
Aspek Pelayanan Publik	0,154468025	0,107153280	0,057249956	0,111146852	0,107504528
Jumlah	1	1	1	1	1

Sumber : Lampiran F (diolah)

**Lampiran L****Bobot Level Pertama, Level Kedua, dan Level Ketiga (Bobot Final)****Prioritas Kebijakan Perencanaan Pembangunan Wilayah Kabupaten Cilacap.**

Level Pertama		Level Kedua		Level Ketiga		Bobot Final
Peningkatan Kualitas Aparat	0,482	Pendidikan dan Pelatihan	0,489	Aspek Pengembangan Kualitas SDM	0,408	0,096
Masterplan Daerah	0,247	Pemasaran Daerah	0,259	Aspek Promosi Daerah	0,294	0,019
Kerjasama antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung	0,158	Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Fisik	0,161	Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung	0,190	0,005
Pemantapan Hukum	0,114	Perizinan	0,090	Aspek Pelayanan Publik	0,108	0,001

Sumber : Lampiran I, J dan K

**Prosentase Bobot Level Pertama, Level Kedua, dan Level Ketiga (Bobot Final)****Prioritas Kebijakan Perencanaan Pembangunan Wilayah Kabupaten Cilacap.**

Level Pertama		Level Kedua		Level Ketiga	
Peningkatan Kualitas Aparat	19,97%	Pendidikan dan Pelatihan	19,68%	Aspek Pengembangan Kualitas SDM	23,58%
Masterplan Daerah	7,62%	Pemasaran Daerah	7,25%	Aspek Promosi Daerah	6,39%
Kerjasama antar Daerah dalam Penyediaan Infrastruktur Pendukung	3,07%	Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Fisik	3,00%	Aspek Pengembangan Infrastruktur Pendukung	2,55%
Pemantapan Hukum	0,97%	Perizinan	1,22%	Aspek Pelayanan Publik	1,03%

Sumber : Lampiran I, J dan K